



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai kode klasifikasi arsip yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah, desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 055 Tahun 2015 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 5 April 2023
Pj. BUPATI BREBES,

TTD

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 5 april 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 8



Kab. Brebes

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000 UMUM

KETATAUSAHAAN DAN
KERUMAHTANGGAAN

Telekomunikasi

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan Dinas Kepala Daerah

Perjalanan Dinas DPRD

Perjalanan Dinas Pegawai

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas Kepala Daerah

Perjalanan Dinas DPR

Perjalanan Dinas Pegawai

Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain:

Permintaan dan penggunaan ruang,
gedung, kendaraan, wisma, rumah
dinas dan fasilitas kantor lainnya)

Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah

Rapat

Penyediaan Konsumsi

Pengurusan Kendaraan Dinas

Pengurusan surat-surat
kendaraan dinas

Pemeliharaan dan perbaikan

Pengurusan kehilangan dan
masalah kendaraan

Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan
Kantor

Pertamanan/ Landscape



Penghijauan
Perbaikan Gedung
Perbaikan Peralatan Kantor
Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
Kebersihan Gedung dan Taman
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan
Komputer
Perbaikan / Pemeliharaan
Pemasangan
Ketertiban dan Keamanan
Pengamanan, Penjagaan, dan
Pengawasan terhadap Pejabat,
Kantor dan Rumah Dinas
Laporan Ketertiban dan Keamanan
Administrasi Pengelolaan Parkir
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,
Petugas Kebersihan dan Pegawai
lainnya

PERLENGKAPAN

Inventarisasi dan Penyimpanan

Data hasil inventarisasi dan
penyimpanan

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi
dan penyimpanan

Pemeliharaan peralatan kantor

Data hasil pemeliharaan kantor
Laporan dan evaluasi pemeliharaan
kantor

Distribusi

Barang habis pakai
Barang milik daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah antara
lain: Keputusan Pembentukan
Tim, Berita Acara Penghapusan
Barang Milik Daerah, Daftar
Barang yang dihapuskan, Laporan
Hasil Pelaksanaan Penghapusan
BMD termasuk didalamnya proses

lelang penghapusan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

PENGADAAN

Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana

penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaankontrak)

Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

PERPUSTAKAAN

Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



Deposit Bahan Pustaka

Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam

Pangkalan Data Penerbit dan
Pengusaha Rekaman



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Terbitan Internasional dan Regional
Pemantauan Wajib Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam
Bibliografi dan Katalog

Koleksi Pustaka

Pembelian

Hibah

Hadiah

Tukar Menukar

Implementasi Undang-Undang

KCKR

Terbitan Internal

Pendistribusian bahan pustaka
surplus

Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

Pengolahan Bahan Pustaka

Pangkalan Data Katalog Koleksi

Layanan Perpustakaan

Keanggotaan

Peminjaman

Pengembangan gemar baca

Kerjasama Perpustakaan

MoU

Perjanjian kerjasama

Partisipasi organisasi profesi dan
kerjasama internasional

Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi

Perpustakaan

Pengembangan situs web

Pengembangan kemas ulang

informasi multimedia

Pengembangan program aplikasi
perpustakaan

Pengembangan pangkalan data
keperustakaan digital

Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

Konservasi

Perawatan Bahan Perpustakaan



Perbaikan Bahan Perpustakaan
Penjilidan Bahan Perpustakaan
Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
Transformasi Digital
Kurasi Digital
Pengembangan Perpustakaan
Perpustakaan Umum
Perpustakaan Khusus
Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan Perguruan Tinggi

KEARSIPAN

Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan Kearsipan

Pengembangan Profesi Arsiparis,
antara lain Formasi Jabatan
Arsiparis, Analisis Kebutuhan
Arsiparis

Bimbingan Konsultasi Arsiparis

Penilaian Arsiparis

Pemilihan Arsiparis Teladan,
antara lain Berkas

Penyelenggaraan Pemilihan
Arsiparis Teladan, Berkas
Penetapan Arsiparis Teladan

Data Base Arsiparis

Bimbingan Konsultasi Kearsipan

Supervisi dan Evaluasi, antara
lain: Perencanaan Supervisi dan
Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi
dan Evaluasi, Laporan Hasil
Supervisi dan Evaluasi

Data Base Bimbingan dan
Konsultasi dan Supervisi

Fasilitasi Kearsipan, antara lain:

Fasilitasi SDM Kearsipan,
Fasilitasi Prasarana dan Sarana



Kearsipan

Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI

Pengelolaan Arsip Dinamis

Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)

Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar

Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

Penyusutan Arsip

Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip

yang alih mediakan)

Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

Pengelolaan Arsip Statis

Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan

Penghargaan dan Imbalan

Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)

Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)

Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

Preservasi Kuratif

Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah

sumber)

Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

Pengelolaan SIKN dan JIKN

Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Pengawasan Kearsipan

Pengawasan Kearsipan Internal

Pengawasan Kearsipan Eksternal

Sanksi

PERSANDIAN

Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pengamanan persandian

Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi

Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi

Materiil sandi: sistem dan peralatan

Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan

Sandi, Komunikasi Sandi

Perencanaan Pengkajian

Administrasi Pengkajian

Pelaksanaan

Pelaporan

Pembinaan dan Pengendalian Persandian

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jaring Komunikasi

Layanan Sertifikasi Elektronik

Perencanaan dan Administrasi



Pelaksanaan Verifikasi



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Penyesuaian Sistem dan Testing
Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pengguna
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat
Elektronik
Pelaporan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan
/Musrenbang

Musrenbang Provinsi

000.7.1.2 Musrenbang Nasional

000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota

000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan

000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan

000.7.1.6 Musrenbang Desa

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka
Panjang

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Rencana Anggaran Daerah

Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembentukan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Program kerja tahunan

Penetapan / Kontrak Kinerja

Laporan Berkala

Laporan Insidental

Evaluasi Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan

Konsultasi Perencanaan Pembangunan

Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan
Pelaporan Perencanaan

Pembangunan

Aksi Strategis Daerah

Rancangan awal perencanaan aksi



strategi daerah

Rapat pembahasan rancangan
awaldengan Perangkat Daerah
Sosisalisasi dengan Perangkat
Daerah

Rancanganakhir perencanaan
aksi strategi daerah

Penerapan perencana aksi strategi
daerah

Perencanaan Pendanaan Pembangunan

Pendanaan Nasional dan Hibah

Pendanaan Daerah

Kerjasama Pembangunan Nasional

Surat Berharga Syariah Negara

Pendanaan On Top atau Inisiatif
Baru

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Struktur Organisasidi lingkungan

Pemerintahan Kabupaten

Brebes Kab/Kota

Pembentukan

Pengubahan

Pembubaran

Uraian Jabatan

Analisa Jabatan

Analisa Beban Kerja

Ketatalaksanaan

Proses Bisnis

Standar Pelayanan

Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik

Standar Kompetensi jabatan struktural dan
fungsional

Evaluasi Kelembagaan

Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

Budaya Kerja

Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN
PENGEMBANGAN

Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian,
pengembangan yang
dilakukan oleh
pemerintah daerah

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
meliputi: rencana kerja,
administrasi penelitian,
pelaksanaan, hasil
penelitian/pengkajian/rekomendas
i

Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian,
hasil pengkajian dan
pengembangan

Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan
pengembangan

Forum komunikasi penelitian, pengembangan
dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi

Data dan informasi hasil penelitian,
pengembangan dan
penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi

Data

Statistik

Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

Master proceeding/ jurnal penelitian,
pengembangan dan
penerapan ilmu
pengetahuan dan
teknologi

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

OTONOMI DAERAH

Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)



Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

Assosiasi Daerah

Otonomi khusus dan daerah istimewa

Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Brebes

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pengembangan Kapasitas Daerah LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

PEMERINTAHAN UMUM

Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Dekonsentrasi dan Kerjasama

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta

Monitoring dan Evaluasi
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

Fasilitasi Kecamatan

Fasilitasi Pelayanan Umum

Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Toponimi dan Data Wilayah

Pengembangan dan Penataan

Batas Antar Negara

Batas Antar Daerah Wilayah

Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar

Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar

Kecamatan

Pemeliharaan Batas Wilayah

HUKUM

Program Legislasi

Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

Program Legislasi

Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan Rancangan

Peraturan Daerah, termasuk

naskah akademik, rancangan awal

sampai dengan rancangan

akhir dan telaah

hukum sampai diundangkan

Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

Keputusan / Ketetapan Gubernur

Keputusan / Ketetapan Bupati

Keputusan / Ketetapan Walikota

Keputusan Sekretaris Daerah

Provinsi



Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten
Keputusan Sekretaris daerah Kota
Instruksi / Surat Edaran
Instruksi / Surat Edaran Provinsi
Instruksi / Surat Edaran
Kabupaten
Instruksi / Surat Edaran Kota
Instruksi / Surat Edaran
Setingkat Eselon II
Surat Perintah
Surat Perintah Gubernur
Surat Perintah Bupati
Surat Perintah Walikota
Surat Perintah Setingkat Eselon II
Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk
Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
Nota Kesepakatan/ Memorandum of
Understanding (MOU)/
Kontrak/ Perjanjian kerja sama
Dalam Negeri
Luar Negeri
Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden dan Peraturan-
Peraturan yang dijadikan referensi)
Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi
Pemberian bantuan/ konsultasi
hukum (Pidana, Perdata, Tata
Usaha Negara dan Agama)
Kasus/ Sengketa Hukum
Pidana Kasus/ sengketa pidana,
baik kejahatan maupun
pelanggaran
Perdata Kasus/sengketa perdata
Tata Usaha Negara
Perburuhan

Arbitrase
Sengketa Adat
Perijinan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Hak Cipta
100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Ketahanan Ideologi Negara
Wawasan Kebangsaan
Bela Negara
Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
Pembauran dan Kewarganegaraan
Kewaspadaan Nasional
Fasilitasi dan Evaluasi
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen Keamanan
Fasilitasi Bina Masyarakat
Perbatasan Antar Negara dan
Kehidupan Masyarakat Perbatasan
Fasilitasi dan Evaluasi
Penanganan Konflik Pemerintahan
Fasilitasi dan Laporan
Penanganan Konflik Sosial
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing
dan Lembaga Asing
Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan
Kemasyarakatan
Ketahanan Seni
Ketahanan Budaya

Agama dan Kepercayaan
Organisasi Masyarakat
Masalah Sosial Masyarakat
Fasilitasi
Pelaksanaan Identifikasi dan
Kompilasi Organisasi Masyarakat
Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan
Dengan Ormas/LNL
Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi
Administrasi
Fasilitasi Sengketa Ormas
Fasilitasi Ormas

Politik Dalam Negeri

Implementasi Kebijakan Politik
Fasilitasi Kelembagaan Politik
Pemerintahan
Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
Verifikasi dan Evaluasi Partai
Politik Yang Memperoleh Kursi
Partai Politik Yang Tidak
Memperoleh Kursi
Pemerintah Daerah
Database Parpol
Pendidikan Budaya Politik
Pemilihan Umum

Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Sumberdaya Alam dan
Kesenjangan Perekonomian
Ketahanan Perdagangan Investasi,
Fiskal dan Moneter
Perilaku Perekonomian Masyarakat
Ketahanan Lembaga Sosial
Ekonomi

PEMILU

Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih



Daftar Penduduk Potensial Pemilih
(DP4) Pemilu
Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Daftar Pemilih Tambahan
Keputusan KPU tentang Daftar
Pemilih Tetap (DPT)
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
(DPT)

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Dokumen pendaftaran peserta
Pemilu dari partai politik
Dokumen hasil verifikasi
administrasi dan faktual partai
politik
Dokumen pendaftaran peserta
Pemilu dari Calon Perseorangan
Dokumen hasil verifikasi
administrasi dan faktual

Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan Daerah Pemilihan dan
Jumlah Kursi Anggota
Keputusan KPU tentang
penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DPR
Keputusan KPU tentang
penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DPR
Keputusan KPU tentang
penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DPRD
Kabupaten/Kota

270.04.05 Peta Daerah Pemilihan

Pencalonan Pemilu

Petunjuk teknis pencalonan
Surat pencalonan pendaftaran
Daftar bakal calon
Dokumen persyaratan masing-
masing bakal calon

Dokumen verifikasi administrasi
Daftar Calon Sementara dan
Calon Tetap

Kampanye Pemilu

Keputusan KPU tentang penetapan
jadwal kampanye

Nama juru

kampanye/pelaksana kampanye

Peringatan

tertulis/penghentian kegiatan

kampanye

Dana Kampanye

Pedoman audit dana kampanye

Laporan dana kampanye peserta

Pemilu

Laporan hasil audit dana kampanye

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Keputusan KPU tentang desain

dan spesifikasi surat suara

Master surat suara

Surat suara yang terpakai

Surat Suara Tidak terpakai

(rusak, salah, dan tidak

digunakan)

Formulir pemilu di Pemerintah

Daerah

Penetapan Hasil Pemilu

Perselisihan Hasil Pemilu

Surat-surat mengenai Perselisihan

Hasil Pemilu

Jawaban dan kesimpulan termohon

Salinan Putusan lembaga peradilan

Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang

dilakukan di Pemerintah Daerah



Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi
Pamong Praja
Tata Operasional Polisi Pamong
Praja
Sarana Prasarana Polisi Pamong
Praja

Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
Perlindungan Masyarakat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi
Manusia

PENANGGULANGAN

BENCANA,

PENCARIAN, DAN

PERTOLONGAN

Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana
yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Perencanaan Penanggulangan Bencana,
Pencarian, dan Pertolongan
Rencana dan standardisasi dan
pengawasan dan perbekalan
Kurikulum dan silabus, evaluasi
dan monitoring
Tenaga pencarian pertolongan,
penyiapan potensi pencarian dan
pertolongan
Permasyarakatan pencarian dan
pertolongan, sertifikasi pencarian
dan pertolongan
Perencanaan dan standardisasi,
penyelenggaraan operasi SAR,
Siaga dan latihan, tempat latihan
Registrasi BEACON

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Potensi Pencarian dan Pertolongan

Bina Ketenagaan dan Permasyarakatan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Penyiapan tenaga dan potensi



Pencarian dan Pertolongan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemasyarakatan dan Sertifikasi
Pencarian dan Pertolongan
Pemasyarakatan Pencarian dan
Pertolongan (Sosialisasi dan
Penyuluhan)
Sertifikasi Pencarian dan
Pertolongan
Operasi Pencarian dan Pertolongan
Rencana Pengembangan dan Standardisasi
Komunikasi
Operasi Komunikasi
Operasi Peralatan Komunikasi
(Berita SAR)
Operasi Peralatan Deteksi Dini
(Berita SAR)
Registrasi BEACON
Inventarisasi dan Pemeliharaan
Pengembangan Sistem Informasi
Penyajian dan Layanan Informasi
Pelaporan dan Evaluasi
Laporan Harian
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Pembangunan Sumber Daya

Fasilitasi Pendidikan ketrampilan
Pengembangan Sumber Daya
Fasilitasi Kesehatan Pengembangan
Sumber Daya
Fasilitasi Sumber daya hayati dan
Pengembangan Sumber Daya
Fasilitasi Mineral, energi dan

lingkungan hidup

Fasilitasi Teknologi dan inovasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya

Pemantauan dan evaluasi

Peningkatan Infrastruktur

Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur

Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur

Pemantauan dan evaluasi

Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha

Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha

Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah

Fasilitasi Kemitraan usaha

Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha

Pemantauan dan evaluasi

Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

Fasilitasi pengembangan usaha

ekonomi perdesaan tertinggal
Monitoring dan evaluasi Ekonomi
desa tertinggal
Identifikasi dan inventarisasi
pengembangan masyarakat dan
desa tertinggal
Fasilitasi pengembangan
masyarakat dan desa tertinggal
Monitoring dan evaluasi
Masyarakat tertinggal
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya

Penguatan kapasitas lembaga lokal
Penguatan organisasi masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
Kerjasama antar lembaga sosial
dan budaya
Ketenagakerjaan
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan lembaga sosial dan
budaya
Pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Daerah Khusus

Fasilitasi pengembangan Daerah
perbatasan
Fasilitasi pengembangan Daerah
rawan konflik dan bencana
Fasilitasi pengembangan Daerah
Perdesaan
Fasilitasi pengembangan Daerah
pulauterpencil dan terluar
Fasilitasi pengembangan Wilayah
strategis
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengembangan daerah khusus
Pemantauan dan evaluasi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pangarusutamaan Gender Ekonomi, Politik
Sosial dan Hukum

Data gender

Advokasi dan fasilitasi

Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah
Sosial, Tenaga Kerja, Korban
Perdagangan)

Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan

Data perlindungan perempuan

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa
kebijakan perlindungan
perempuan

Sistem aplikasi dan jaringan
informasi gender

Analisis dan penyajian informasi
gender

Partisipasi publik untuk
kesejahteraan ibu

Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah
Sosial, Kekerasan Terhadap Anak,
Anak Berkebutuhan Khusus, Anak
Berhadapan Dengan Hukum)

Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak

Data perlindungan anak

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa
kebijakan perlindungan anak

Partisipasi publik untuk
kesejahteraan anak

Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan,
Kesehatan, Partisipasi,
Lingkungan dan



Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

Pemenuhan Hak Anak

Data Klaster Hak Anak

Data tumbuh kembang anak

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

PENDIDIKAN

Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

Pelatihan Sosial

Peringatan Hari anak

Block Grant

Pendidikan Masyarakat

Penyelenggaraan Program

Penilaian dan pemberian bantuan sosial

Pembinaan Program

Lomba/Pemberian Penghargaan

Pameran

Rakor

Sosialisasi

Sertifikasi dan Akreditasi

Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama



Kurikulum, bahan ajar
Block Grant
Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
Lomba, penghargaan,
penganugerahan
Bantuan operasional sekolah (BOS)
Bantuan Siswa Miskin
Pendidikan khusus/Layanan Khusus
Kurikulum, Bahan ajar, alat
bantu pembelajaran
Block Grant
Lomba, festival
Sosialisasi, bimtek
Pendataan
Kelembagaan
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
Pendataan dan Pemeetaan
Uji Kompetensi Guru
Sertifikasi Guru
Penghargaan guru dan tenaga
kependidikan
Peningkatan kesejahteraan guru
Sosialisasi, bimtek
Block Grant
Sekolah Menengah Atas
Kurikulum
Bahan Ajar
Pelatihan
Block grant
Bimbingan teknis/sosialisasi
Lomba, Sayembara, festival
Bantuan operasional Sekolah (BOS)
Bantuan siswa miskin
Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
Bahan ajar
Petunjuk Teknis
Block grant
Sosialisasi, bimtek

Lomba, sayembara, jambore,
festival

Kurikulum/bahan pembelajaran

Alat bantu pembelajaran

Pendataan

Kelembagaan (Unit kesehatan
sekolah, Pendidikan jasmani
adaptif, pendidikan inklusi

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pendataan dan Pemetaan

Uji Kompetensi Guru

Setifikasi Guru

Penilaian prestasi kerja guru dan
pengawas sekolah

Penghargaan guru dan tenaga
kependidikan

Peningkatan kesejahteraan guru
dan tenaga pendidik

Block grant

Bimbingan teknis/sosialisasi

Penilaian Pendidikan

Penilaian Akademik

Penilaian Non Akademik

Analisis dan Sistem Informasi

Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan

400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan

400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan
Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan

400.3.13.1 Prasarana Pendidikan

400.3.13.2 Sarana Pendidikan

400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

KEOLAHRAGAAN

Kebijakan di bidang Keolahragaan yang
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Pengelolaan Olahraga Pendidikan



Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
Olahraga Pendidikan Tinggi
Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 Olahraga Massal
 Olahraga Tradisional
 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata

Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
 Olahraga Pendidikan
 Olahraga Rekreasi
 Olahraga Prestasi
 Sekolah Khusus Olahraga

Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 Olahraga Tradisional
 Layanan Khusus

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 Kemitraan Keolahragaan
 Penghargaan Olahraga

Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 Pembibitan Olahraga
 Kompetisi
 IPTEK Olahraga

Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 Tenaga Keolahragaan
 Organisasi Keolahragaan

Industri dan Promosi Olahraga
 Industri Olahraga
 Promosi Olahraga

Olahraga Prestasi
 Daerah
 Nasional
 Internasional

Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
Standardisasi Keolahragaan
Akreditasi dan Sertifikasi
Keolahragaan
Infrastruktur Olahraga

KEPEMUDAAN

Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

Penelusuran (Duta Kepemudaan)

Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)

Pengembangan

Peningkatan Wawasan Pemuda

Wawasan Kebangsaan

Wawasan Lingkungan

Wawasan Sosial dan Hukum

Peningkatan Kapasitas Pemuda

Kapasitas Iman dan Taqwa

Kapasitas IPTEK

Pemanfaatan IPTEK

Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)

Pengkajian

Pengembangan

Pendayagunaan (fasilitasi)

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan

Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan

Kewirausahaan

Kelembagaan

Pengaderan

Perintisan
Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan
Kepramukaan
Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan: Kelembagaan dan
Sumberdaya
Pemberdayaan Organisasi
Kemahasiswaan: Kelembagaan dan
Sumberdaya
Pemberdayaan Organisasi
Kepelajaran: Kelembagaan dan
Sumberdaya
Pengawasan Kepramukaan:
Kelembagaan, Program dan
Sumberdaya
Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
Standardisasi
Infrastruktur Pemuda
Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
Kemitraan
Penghargaan Pemuda

KEBUDAYAAN

Kebijakan di bidang Kebudayaan yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan
apresiasi film
400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

Sejarah dan Nilai Budaya
Sejarah

Pemetaan nilai
Verifikasi dan Perumusan Nilai
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi sejarah dan nilai
sejarah
Publikasi sejarah dan nilai sejarah
Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Internalisasi nilai budaya
Kekayaan budaya
Warisan budaya nasional dan
dunia
Diplomasi budaya

KESEHATAN

Kebijakan di bidang Kesehatan yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Upaya Kesehatan Dasar

Pelayanan kedokteran keluarga
Praktek klinis dokter di pelayanan
kesehatan primer
Pelaksanaan kesehatan primer
Kesehatan gigi dan mulut di
puskesmas
Kesehatan gigi dan mulut di
rumah sakit
ICD 10, Destistry & Stomatology
Infeksi menular lewat transfusi
darah
Penyakit mulut di tingkat primer
Pembiayaan darah
Penggunaan darah rasional
Unit transfusi darah, bank darah
rumah sakit dan jejaring
pelayanan darah
Pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, sangat terpencil dan
kepulauan
Akreditasi puskesmas

Puskesmas berprestasi

Upaya Kesehatan Rujukan

Pelayanan kesehatan rujukan

Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)

Pelayanan rumah sakit privat

Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan

Pelayanan pasien jaminan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa

Badan pengawas rumah sakit

Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)

Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya

Keperawatan dan keteknisian medik

Pelayanan Keperawatan Dasar

Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit

Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

Bina pelayanan kebidanan

Penunjang medik dan sarana kesehatan

Mikrobiologi dan imunologi

Patologi dan toksilogi

Radiologi

Perizinan dan sertifikasi

Sarana dan prasarana kesehatan

Peralatan medis di fasilitas

pelayanan kesehatan

Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan

Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan

Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan

Etikolegal dan asesmen

Pencegahan dan

penanggulangan narkotika dan sejenisnya

Etikolegal dan asesmen

Kesehatan jiwa kelompok beresiko

Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan

Matra

Surveilans dan respon kejadian luar biasa

Imunisasi

Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan

Kesehatan matra

Pengendalian penyakit menular langsung

Pengendalian tuberkolosis

Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual

Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan

Pengendalian kusta dan frambusia

Pengendalian penyakit bersumber binatang

Pengendalian malaria

Pengendalian arbovirosis

Pengendalian zoonosis

Pengendalian filariasis dan kecacingan

Pengendalian penyakit tidak menular

- 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
- 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
- Penyakit kanker
- Penyakit kronis dan generatif
- Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
- Penyehatan lingkungan
 - Penyehatan air dan sanitasi dasar
 - Pemukiman dan tempat umum
 - Kawasan dan sanitasi darurat
 - Higien sanitasi pangan
 - Pengamanan limbah, udara, radiasi
- Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
- Gizi
 - Gizi makro
 - Gizi mikro
 - Gizi klinik dan diatetik
 - Konsumsi makanan dan jasa makanan
 - Kewaspadaan gizi
- Kesehatan ibu
 - 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
 - 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
 - 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
 - Keluarga berencana
 - Perlindungan kesehatan reproduksi
- Kesehatan anak
 - Kelangsungan hidup bayi
 - Kelangsungan anak balita dan prasekolah
 - Kewaspadaan penanganan balita beresiko
 - Kualitas hidup anak usia sekolah

dan remaja
Perlindungan kesehatan anak
Kesehatan Tradisional alternatif dan
komplementer
Kesehatan tradisional keterampilan
Kesehatan tradisional ramuan
Kesehatan alternatif dan
komplementer
Penapisan dan kemitraan
Kesehatan kerja dan Olah raga
Pelayanan kesehatan kerja
Kapasitas kerja
Lingkungan kerja
Kemitraan kesehatan kerja
Kesehatan perkotaan
Kesehatan olahraga
Obat Publik dan perbekalan kesehatan
Harga obat publik
Pengadaan obat
Perbekalan kesehatan
Produksi dan distribusi alat kesehatan
Alat kesehatan
Produsen dan distributor alat
kesehatan dan obat
Produk diagnostik in vitro dan
perbekalan kesehatan rumah
tangga
Kefarmasian
Pelayanan kefarmasian
Farmasi klinis
Farmasi Komunitas
Penggunaan obat rasional
Produksi dan distribusi kefarmasian
Obat tradisional
Kosmetik dan makanan
Narkotika, psikotropika, prekursor
farmasi dan sediaan farmasi
khusus

Kemandirian obat dan bahan baku
obat

Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan

Surat keterangan

Sertifikasi dan perijinan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan

Tanggap darurat dan pemulihan

Pemantauan dan informasi

Penanggulangan krisis kesehatan
dalam bidang pengendalian
penyakit dan penyehatan

Pelayanan kesehatan reproduksi
situasi bencana

Pengembangan dan Jaminan Kesehatan

Tersedianya data NHA setiap tahun

Tersedianya dokumen teknis
penguatan pelaksanaan JKN

Intelegensia Kesehatan

Pemeliharaan dan peningkatan
kemampuan inteligensia
kesehatan

Penanggulangan masalah
inteligensia kesehatan

Kesehatan Haji

Pelayanan dan pendayagunaan
sumber daya kesehatan haji

Peningkatan kesehatan dan
pengendalian faktor risiko
kesehatan haji

Promosi Kesehatan

Sarana Promosi Kesehatan

Pembinaan advokasi dan
kemitraan serta pemberdayaan
peran

Pengembangan pesan promosi
kesehatan

Hari Kesehatan

Data dan Informasi

Statistik kesehatan

Analisis dan diseminasi informasi

Pengembangan sistem informasi
dan bank data kesehatan

Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

Penilaian obat tradisional,
suplemen makanan dan kosmetik

Standardisasi obat tradisional,
kosmetik dan produk komplimen

Inspeksi dan sertifikasi obat
tradisional, kosmetik dan produk
komplimen

Obat Asli Indonesia

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Penilaian keamanan pangan

Standardisasi produk pangan

Inspeksi dan sertifikasi produk
pangan

Surveilans dan penyuluhan
keamanan pangan

Pengawasan produk dan bahan
berbahaya

Rekam Medis

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Fasilitasi

Data Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
Pelaksanaan Kerukunan Umat
Beragama dan Kepercayaan
Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan
dan Kepercayaan



Kasus Keagamaan
Kasus Aliran Keagamaan
Pembinaan Kepercayaan
Kepada Tuhan YME
Kelembagaan dan kepercayaan
Pembinaan Kerukunan Hidup
Beragama
Komunitas Kepercayaan
Pengetahuan dan ekspresi budaya
tradisional
Lingkungan Budaya dan Pranata
Sosial

SOSIAL

Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial anak balita

Kesejahteraan sosial anak terlantar

Kesejahteraan sosial anak

berhadapan dengan hukum

Kesejahteraan sosial anak dengan
kecatatan

Kesejahteraan sosial anak yang
membutuhkan perlindungan
khusus

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial orang dengan
kecacatan tubuh dan bekas
penderita penyakit kronis, netra
dan runtu wicara, mental

Kelembagaan dan advokasi sosial

Asistensi dan pemeliharaan
kesejahteraan sosial

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Gelandangan, pengemis dan
pemulung

Tuna susila dan korban trafficking

perempuan
Warga binaan lembaga
pemasyarakatan meliputi
penyiapan, reintegrasi
Pelayanan sosial orang dengan HIV
/ AIDS dan kelompok minoritas
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA
Pelayanan sosial lanjut usia
Pelayanan sosial dalam dan luar
panti
Pengembangan kelembagaan
meliputi pembinaan lembaga,
kerjasama lembaga
Advokasi dan pelayanan sosial
ke daruratan
Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana
bantuan sosial
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan
dan Pekerja Migran
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Ketahanan sosial masyarakat
meliputi keserasian sosial,
penguatan Sumber Daya
Tanggap darurat meliputi
bantuan darurat, advokasi sosial
Pemulihan sosial meliputi
penguatan sosial, reintegrasi sosial
Kerjasama meliputi kerjasama
pemerintah, kerjasama non
pemerintah
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Kesiapsiagaan dan mitigasi
Tanggap darurat meliputi bantuan
darurat, advokasi sosial
Pemulihan sosial dan penguatan
sosial
Kerjasama

Jaminan Sosial

Seleksi dan verifikasi

Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi

Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran Kerjasama

Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial

Ketahanan keluarga

Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial

Kemitraan dunia usaha

Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas

Pemberdayaan komunitas adat terpencil

Persiapan pemberdayaan

Pemberdayaan sumber daya manusia

Penggalian dan pengembangan potensi

Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

Kerjasama kelembagaan

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Identifikasi dan analisis

Pengembangan kapasitas

Penataan sosial lingkungan kumuh

Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

Bantuan Langsung

Kerjasama Kelembagaan

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Penghargaan dan
kesejahteraan keluarga pahlawan
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan keperintisan
Pengembangan kesetiakawanan
sosial
Pengelolaan taman makam
pahlawan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Pengembangan
Desa dan Kelurahan

Administrasi Pemerintahan Desa
dan Kelurahan

Fasilitasi Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa

Pengembangan Kapasitas Desa

Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Lembaga Masyarakat

Pembangunan Partisipatif

Pendataan Potensi Masyarakat

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pelatihan Masyarakat

Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya

Masyarakat

Budaya Nusantara

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga

Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kerja Perdesaan

Usaha Ekonomi Masyarakat



Usaha Pertanian dan Pangan
Usaha Perkreditan dan Simpan
Pinjam
Produksi dan Pemasaran
Usaha Ekonomi dan Keluarga
Ekonomi Perdesaan dan
Masyarakat Tertinggal
Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan
Fasilitasi Konservasi dan
Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan
Pesisir Perdesaan
Fasilitasi Prasarana dan Sarana
Perdesaan
Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan
Pengkajian Teknologi Perdesaan
Pemasyarakatan dan Kerjasama
Teknologi Perdesaan
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Kebijakan di bidang Pertamanan dan
Pemakaman yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan
Tepian Air

Peran Serta Masyarakat
Pengawasan dan Penindakan
Pengelolaan Data
Evaluasi dan Pelaporan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kebijakan di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pendaftaran Penduduk

Identitas Penduduk

Pindah Datang Penduduk Dalam
Wilayah NKRI

Pindah Datang Penduduk Antar
Negara

Pendataan Penduduk Rentan
Monitoring Evaluasi dan
Dokumentasi

Pencatatan Sipil

Kelahiran dan Kematian

Perkawinan dan Perceraian

Pengangkatan Pengakuan dan
Pengesahan Anak serta Perubahan

Pencatatan Kewarganegaraan

Monitoring Evaluasi dan
Dokumentasi

Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

Kelembagaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Pengelolaan data Administrasi
Kependudukan

Penyajian dan Layanan Informasi

Administrasi Kependudukan

Monitoring Evaluasi dan
Dokumentasi



Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Kuantitas Penduduk

Kualitas Penduduk

Mobilitas Penduduk

Perlindungan dan Pemberdayaan
Penduduk

Pengembangan Wawasan
Kependudukan, Monitoring dan
Evaluasi

Penyerasian Kependudukan

Indikator Kependudukan

Proyeksi Penduduk

Perencanaan Kependudukan

Penyerasian Kebijakan
Kependudukan dengan Lembaga
Non Pemerintah

Pelaksanaan Penyerasian
Kebijakan Kependudukan dengan
Lembaga Pemerintah

KELUARGA BERENCANA

Kebijakan di bidang Keluarga
Berencana yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Analisis pengaduan kebijakan pengendalian
penduduk
Pengumpulan dan pengolahan data
Evaluasi dan pelaporan

Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian
penduduk
Penyiapan fasilitas
Evaluasi dan pelaporan

Profil dan proyeksi penduduk
Data profil dan proyeksi penduduk
Evaluasi data profil dan proyeksi
penduduk

Penetapan parameter pengendalian penduduk
Penetapan sasaran parameter

Evaluasi sasaran parameter
Pemanfaatan perencanaan pengendalian
penduduk
Pemanfaatan profil dan proyeksi
Pemanfaatan parameter

Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem Jalur
Pendidikan Formal

Pengembangan Sistem Jalur
Pendidikan Nonformal dan
Informal

Pengembangan Materi

Pengembangan Materi Jalur
Pendidikan Formal

Pengembangan Materi Jalur
Pendidikan Nonformal dan Informal

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Jalur
Pendidikan Formal

Monitoring dan Evaluasi Jalur
Pendidikan Nonformal dan
Informal

Analisis Sosial

Analisis Ekonomi

Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan
Keamanan

Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan

Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan
Klinik Pemerintah

Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana
keluarga berencana

Kualitas pelayanan keluarga berencana
pemerintah

Standarisasi pelayanan keluarga berencana
pemerintah

Monitoring dan evaluasi pelayanan
keluarga berencana pemerintah

Bina keluarga berencana rumah sakit dan
klinik swasta

Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga
berencana swasta

Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.1 Standarisasi pelayanan
keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan
keluarga berencana swasta

Akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana jalur wilayah
tertinggal, terpencil dan
perbatasan

Peningkatan akses pelayanan
keluarga berencana wilayah
tertinggal, terpencil, dan
perbatasan

Peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana wilayah
tertinggal, terpencil, dan
perbatasan

Akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana wilayah miskin
perkotaan 400.13.21.1

Peningkatan akses
pelayanan

keluarga berencana wilayah miskin
perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana wilayah
miskin perkotaan

Kesertaan keluarga berencana pria

Peningkatan akses keluarga
berencana pria

Peningkatan partisipasi keluarga
berencana pria

Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

Pencegahan kanker alat reproduksi dan
penanggulangan infertilitas



Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak

Monitoring bina keluarga Balita dan anak

Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

Pelebagaan bina ketahanan remaja

Pelebagaan bina ketahanan remajajalur pendidikan

Pelebagaan bina ketahanan remajajalur masyarakat

Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2

Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

Pengembangan Program Bina Ketahanan

Keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia

Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga

Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomikeluarga

Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Advokasi dan pencitraan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

Sarana produksi media komunikasi

Produk media komunikasi

Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Hubungan dengan lembaga non pemerintah

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah

400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

Tenaga Lini Lapangan

Pengembangan tenaga lini lapangan
Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

Institusi Masyarakat Pedesaan

Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

Mekanisme Operasional lini lapangan

Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

Pengumpulan dan pengolahan data

Analisis dan evaluasi

Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Sistem aplikasi dan bank data

Pengembangan sistem aplikasi

Pengelolaan bank data

Infrastruktur teknologi informasi

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

Dokumentasi dan penyebaran informasi

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
400.13.54.2

Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

HUBUNGAN MASYARAKAT

Keprotokolan

Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

Buku tamu Keprotokolan

Agenda kegiatan pimpinan daerah

Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

Daftar nama/alamat kantor /pejabat

Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa- peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/

rekaman



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

suara/ multi media

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian
informasi kelembagaan

Kliping koran

Brosur /Leaflet/poster /plakat

Pengumuman /pemberitaan

Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan
Kabupaten Brebes

Hubungan antar lembaga
pemerintah

Hubungan dengan organisasi
sosial / LSM

Hubungan dengan perusahaan

Hubungan dengan Perguruan

Tinggi/ sekolah, termasuk magang,

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/

Praktek Kerja Lapang (PKL)

Forum Kehumasan

Hubungan dengan Media Massa

Dengar pendapat/hearing DPRD

Bahan/materi pidato/siding Muspida
Provinsi/Kota/Kabupaten

Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal

Publikasi melalui media cetak maupun
elektronik

Pameran /sayemara/lomba/festival,
pembuatan spanduk dan
iklan

Penghargaan/tanda kenang-kenangan

Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela
Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

KETAHANAN PANGAN

Kebijakan dibidang Ketahanan Pangan yang
dilakukan Pemerintah Daerah

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketersediaan Pangan

Akses Pangan



Kerawanan Pangan
Distribusi dan Cadangan Pangan
Distribusi Pangan
Harga Pangan
Cadangan Pangan
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
Konsumsi Pangan
Penganekaragaman Pangan
Keamanan Pangan Segar
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
Dewan Ketahanan Pangan
Penghargaan Ketahanan Pangan
Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
Bimbingan Teknis
Evaluasi

PERDAGANGAN

Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Perdagangan Dalam Negeri
Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
Bina Usaha Jasa Perdagangan
Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
Informasi Perusahaan
Pelaku Pasar
Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
Pengembangan Produk Lokal
Pencitraan Produk Dalam Negeri
Pengembangan Sarana Distribusi
Pengelolaan Sarana Distribusi
Kerjasama Pengembangan Sistem

Logistik

Informasi dan Bimbingan Teknis

Penyedia Jasa Logistik

Informasi Pasar

Informasi Hasil Industri

Barang Strategis

Bahan Pokok Agro

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kelembagaan dan informasi standar

Kerjasama Standarisasi

Perumusan dan penerapan standar

Tata usaha

Kerjasama, informasi, dan
publikasi

Analisa penyelenggaraan

perlindungan konsumen

Bimbingan konsumen dan pelaku
usaha

Fasilitas kelembagaan

Produk pertambangan dan aneka
industri

Produk pertanian, kimia dan
kehutanan

Jasa

Kerjasama

Sarana dan Kerjasama

Kelembagaan dan dan penilaian

UTTP dan Standar Ukuran

Pengawasan

Balai pengelolaan Standar Nasional

Satuan Ukuran

Balai Pengujian UTTP

Perdagangan Berjangka Komoditi

Pengkajian pasar

Pengawasan Transaksi

Pengawasan Keuangan dan Audit

Pengkajian pasar

Pengembangan Pasar



Sistem informasi
Pembinaan pasar lelang dan
sistemresi gudang
Pengawasan pasar lelang
Pengawasan sistem gudang
Bimbingan Teknis
Evaluasi

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Kelembagaan Koperasi dan UKM

Organisasi dan Badan Hukum
Koperasi

- 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
- 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
- 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
Produksi
- 500.3.3 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura
- 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
- 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
- 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan
Pertambangan
- 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka
Usaha Pembiayaan
- 500.3.4.1 Program Pendanaan
- 500.3.4 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian
Simpan Pinjam
- 500.3.4.3 Urusan Permodalan
- 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
- 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan
Kredit
- 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir
KUKM (LPDB)

Pemasaran dan Jaringan Usaha

Perdagangan Dalam Negeri

Ekspor dan Impor

Sarana dan Prasarana Pemasaran

Kemitraan dan Jaringan Usaha

Informasi dan Publikasi Bisnis

Lembaga Layanan Pemasaran LLP

Koperasi dan UKM

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kewirausahaan

Kebijakan Pendidikan Koperasi dan

UKM

Peran Serta Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Diklat

Koperasi dan UKM

Advokasi

Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu

500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha

500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga

Pengembangan Bisnis (LPB)

500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK

500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK

500.3.8.1 Penelitian Koperasi

500.3.8.2 Penelitian UKM

500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya

500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Peraturan Perundang-Undangan

Sarana dan Prasarana

Monitoring dan Evaluasi

KEHUTANAN

Kebijakan di bidang Kehutanan yang

dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Penyuluhan



Program Kerja Penyuluhan
Materi Penyuluhan
Program Penyuluhan
Sarana Penyuluhan
Pengembangan Tenaga Penyuluhan
Pelaksanaan Penyuluhan
Pemberdayaan Masyarakat
Deseminasi
Evaluasi, dan Laporan

Planologi Kehutanan

Perencanaan Makro Kawasan
Hutan
Penataan Ruang Kawasan Hutan
Statistik dan Jaringan Komunikasi
Data Kehutanan
Pengukuhan dan Penataaan
Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi dan Peruntukan
Kawasan Hutan
Informasi dan Dokumentasi
Kawasan Hutan
Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Pemantauan Sumber Daya Hutan
Pemetaan Sumber Daya Hutan
Jaringan Data Spasial
Penggunaan Kawasan Hutan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Penggunaan Kawasan
Hutan
Informasi Penggunaan Kawasan
Hutan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan
Penyiapan Areal Pemanfaatan
Hutan
Informasi Wilayah Pengolaandan
Pemanfaatan Kawasan Hutan

Bina Usaha Kehutanan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Data areal HPH /HTI/IUPHHK
SK HPH/HTI/IUPHHK
Kerjasama
Pembatalan/Penolakan
Perpanjangan
Modal dan Peralatan
Investasi Industri
Peralatan
Tenaga Kerja
Pemegang Saham
Neraca Perusahaan
Rencana Karya Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP)
Rencana Karya Pengusahaan
Hutan (RKPH)
Rencana Karya Tahunan
Pengusahaan Hutan (RKT)
Rencana Karya Lima Tahun
Pengusahaan Hutan (RKL)
Target Produksi RKT dan Beban
Kerja
Produksi Kayu
Produksi non kayu
Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
Industri Kayu Non
HPH/HTI/IUPHHK
Industri Non Kayu
Hutan Tanaman Industri Pulp
Hutan Tanaman Industri
Pertukangan
Pelanggaran dan Sanksi
Pemblokiran
Denda
Pencabutan Areal
HPH/HTI/IUPHHK
Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
Penataan Pemanfaatan Hutan

Produksi
Informasi Sumber Daya Hutan
Produksi
Pengembangan Investasi Usaha
Penyiapan Pemanfaatan Hutan
Alam
Rencana Kerja Pemanfaatan
Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha
Produksi Hasil
Produksi Hutan Alam
Penilaian Kinerja Usaha
Pemanfaatan Hutan Alam
Pengembangan Hutan Tanaman
Industri
Pengembangan Hutan Tanaman
Rakyat
Pengembangan Rencana Kerja
dan Produksi Hutan
Tanaman/Rencana Kerja Usaha
Produksi
Penilaian Kinerja Pengembangan
Usaha Pemanfaatan Hutan
Tanaman
Pembiayaan Hutan Tanaman
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Hasil Hutan
Peredaran Hasil Hutan
Pengukuran dan Pengujian Hasil
Hutan
Penertiban Peredaran Hasil Hutan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan
Pengendalian Bahan Baku dan
Industri Primer Hasil Hutan
Penilaian Kinerja Industri dan
Pemasaran Hasil Hutan
Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur



Standardisasi dan Lingkungan

Standardisasi

Sarana Pengujian Hasil Hutan

Pengembangan

Pemasaran Hasil Hutan

Pengendalian Lingkungan

Angkutan Hasil Hutan

Tanda Pengenal Perusahaan Tata

Usaha Hasil Hutan

Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan

Palu Tok Kualitas Tata Usaha

Hasil Hutan

Pass Angkutan Hasil Hutan

Sertifikat Ekspor Hasil Hutan

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Flora dan Fauna yang Dilindungi

Flora dan Fauna yang Tidak

Dilindungi

Lembaga Konservasi/Kebun

Binatang

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Kawasan Konservasi

Pengamanan Hutan

Program dan Evaluasi Penyidikan
dan Perlindungan

Penyidikan dan Perlindungan

Wilayah Hutan

Polisi Kehutanan dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan dan Wisata Alam

Bina Cinta Alam

Kader Konservasi Sumber Daya
Alam

Data organisasi pencinta alam dan
kader konservasi SDA

Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial



Pengelolaan Benih

Kebun Benih

Tegakan Benih

Pengadaan Benih

Pengujian dan Penyimpanan Benih

Lalu Lintas Angkutan Benih

Pembibitan

Lalu Lintas Angkutan Benih

Pengembangan Usaha Perbenihan

Pengendalian Peredaran Benih

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tanaman Reboisasi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(DAS)

Perhutanan Sosial

Pengendalian Perladangan

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penelitian, Pengkajian dan
Pengembangan Kehutanan

Monitoring dan Evaluasi Penelitian
Diseminasi

Gelar Teknologi

Forum Komunikasi Penelitian dan
Pengembangan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Perikanan Tangkap

Data dan Statistik Perikanan
Tangkap

Rancang Bangun dan Kelaikan
Kapal Perikanan

Rancang Bangun dan Kelaikan
Alat Tangkap Ikan

Pendaftaran Kapal Perikanan

Pengawasan Kapal dan
Ketenagakerjaan Perikanan

Perbantuan dan Evaluasi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikan

Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
Tata Pengusahaan Penangkapan
Ikan

Verifikasi Dokumen Penangkapan
Ikan

Pelayanan Dokumen

Penangkapan Ikan

Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Usaha Penangkapan
Ikan

Kelembgaan Usaha Penangkapan

Investasi dan Permodalan Usaha

Kenelayanan

Pembinaan Pengelolaan Usaha

Pemantauan dan Evaluasi Usaha

Penangkapan Ikan

Perikanan Budidaya

Potensi Lahan dan Air

Prasarana dan Sarana Budidaya

Air Tawar

Pengelolaan Induk Perbenihan

ikan airtawar

Perbenihan Skala Kecil

Informasi dan Distribusi

Pembenihan

Budidaya Air Tawar

Budidaya Ikan Hias

Sertifikasi Budidaya Perikanan

Data dan Statistik Perikanan

Budidaya

Hama dan Penyakit Ikan

Perlindungan Lingkungan Budidaya

Investasi dan Permodalan Usaha

Budidaya

Kewirausahaan Budidaya



Pelayanan Usaha Budidaya
Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
Promosi Usaha dan Budaya
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Standarisasi Pengolahan Hasil
Pengembangan Produk
Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Industri Pengolahan
Sarana dan Prasarana Pengolahan
Hasil
Standarisasi Pengembangan
Produk Non Konsumsi
Promosi dan Jaringan Ikan Hias
Pengembangan Industri
Sarana dan Prasarana
Pengembangan Produk Non
Konsumsi
Kelembagaan Pemasaran Dalam
Negeri
Analisis dan Informasi Pasar
Dalam Negeri
Jaringan Distribusi dan Kemitraan
Pemasaran Dalam Negeri
Promosi dan Kerja Sama
Pemasaran Dalam Negeri
Sarana dan Prasarana Pemasaran
Dalam Negeri
Kelembagaan Pemasaran Luar
Negeri
Analisis dan Informasi Pemasaran
Luar Negeri
Pengembangan Ekspor
Pengembangan Impor
Promosi dan Kerja Sama
Pemasaran Luar Negeri
Pelayanan Usaha
Kemitraan Usaha

Ketenagakerjaan Pengolahan dan
Pemasaran
Investasi dan Permodalan
Informasi dan Promosi
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Rencana Tata Ruang Laut
Nasional dan Perairan Yurisdiksi
Rencana Tata Ruang dan Zona
Wilayah I
Rencana Tata Ruang dan Zona
Wilayah II
Informasi dan Evaluasi Spasial
Jejaring, Data, dan Informasi
Konservasi
Konservasi Wawasan
Konservasi Jenis Ikan
Pemanfaatan Kawasan dan Jenis
Ikan
Mitigasi Bencana Lingkungan
Pendayagunaan Sumber Daya
Kelautan
Penanggulangan Pencemaran
Sumber Daya Pesisir dan Laut
Rehabilitasi dan Reklamasi
Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
Pengelolaan Ekosistem Pulau-
Pulau Terkecil
Investasi dan Promosi Pulau-Pulau
Terkecil
Sarana dan Prasarana Pulau-
Pulau Terkecil
Akses Permodalan
Akses Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Sosial Budaya Masyarakat
Pengembangan Usaha
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan

Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat

Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur

Pengawasan

Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran

Pengawasan Usaha Budidaya

Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi

Pengawasan Pencemaran Perairan

Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil

Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati

Logistik dan Operasional Wilayah Barat

Logistik dan Operasional Wilayah Timur

Perawatan Kapal Pengawas

Pengawasan Kapal Pengawas

Sistem Pemantauan

Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Pemantauan Sumber Daya

Perikanan

Pengembangan

Infrastruktur Pengawasan

Penyidikan

Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan

Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Pelanggaran

Karantina Ikan

Pemeriksaan Ikan

Penahanan



Pengasingan
Pengamatan
Pengakuan
Penolakan
Pemusnahan
Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
Permohonan Sertifikat
Pemasukan Formulir
Pemasukan Sertifikat
Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
Surat Perintah
Rekomendasi
Penutupan Suatu Area
Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
Pengawasan Peraturan
Perkarantinaan
Pengawasan Pelaksanaan
Operasional
Instalasi Karantina Sementara
Lokasi Karantina

PERTANIAN

Kebijakan di bidang Pertanian yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Perlindungan hortikultura

Perlindungan Tanaman Buah

Perlindungan Tanaman Sayuran
dan Tanaman Obat

Perlindungan Tanaman Florikultura

Dampak iklim dan Persyaratan
Teknis

Perbenihan Hortikultura

Penilaian Varietas

Pengawasan Mutu Benih

Budidaya dan Pascapanen

Florikultura

Perluasan dan Pengelolaan Lahan



Basis Data Lahan
Pengendalian Lahan
Optimasi, Rehabilitasi dan
Konservasi Lahan
Perluasan Kawasan Tanaman
Pangan
Perluasan Kawasan
Hortikultura, Perkebunan dan
Peternakan
Pengelolaan Air Irigasi
Pengembangan Sumber Air
Pengembangan Jaringan dan
Optimasi Air
Iklim, Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup
Kelembagaan
Pembiayaan Pertanian
Pembiayaan Program
Pembiayaan Syariah dan Kerja
Sama
Pembiayaan agribisnis
Kelembagaan dan Pemberdayaan
agribisnis
Pupuk Pestisida
Pupuk Organik dan Pembenah
Tanah
Pupuk Anorganik
Pestisida
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Alat dan Mesin Pertanian
Pengembangan Alat dan Mesin
Pertanian
Pengawasan dan Peredaran Alat
dan Mesin Pertanian
Kelembagaan dan Pelayanan Alat
dan Mesin Pertanian
Perbenihan Tanaman Pangan
Penilaian Varietas dan Pengawasan

Mutu Benih
Produksi Benih Serealia
Produksi Benih Aneka Kacang dan
Umbi
Kelembagaan Benih

Budidaya Serealia
Padi Irigasi dan Rawa
Padi Tadah Hujan dan Lahan
Kering
Jagung
Serealia Lain

Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
Kedelai
Ubi Kayu
Aneka Kacang
Aneka Umbi

Tanaman Pangan
Pengelolaan Data Organisasi
Penggangu Tumbuhan
Dampak Perubahan Iklim
Teknologi Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan
Pengelolaan Pengendalian Hama
Tepadu

Pascapanen Tanaman Pangan
Padi
Jagung dan Serealia lain
Kedelai dan Aneka Kacang Aneka
Umbi

Pengolahan Hasil Pertanian
Tanaman Pangan
Hortikultura
Perkebunan
Pternakan

Mutu dan Standarasi
Standardisasi
Penerapan dan Pengawasan
Jaminan Mutu

Akreditasi dan Kelembagaan
Kerjasama dan Harmonisasi
Pengembangan Usaha dan Investasi
Kemitraan dan Kewirausahaan
Investasi
Promosi Dalam Negeri
Promosi Luar Negeri
Pemasaran Domestik
Informasi Pasar
Pemantauan Pasar dan Stabilisasi
Harga
Sarana dan Kelembagaan Pasar
Jaringan Pemasaran
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan
Pengembangan, antara lain:
Rencana Kerja, TOR/ Proposal,
Pembentukan Tim Kerja dan
Surat menyurat
Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
Hasil Penelitian dan Pengembangan
Hasil Pengkajian dan Kebijakan
dan Strategi
Diseminasi
Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
Pameran, Temu Lapang, Temu
Bisnis, Demlot, Seminar
Lokakarya, Temu Karya,
Workshop
Jurnal, Buletin, Monograf,
Prosiding, dan Publikasi lainnya
Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan
Pengembangan
Forum Komunikasi Penelitian dan
Pengembangan
Data Penelitian dan Pengembangan
Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan
Pengembangan
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Hak Cipta

- 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
- 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
- 500.6.26.4 Hak Merek
- 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
- 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
- 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi
 - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- Karantina Pertanian
 - Karantina Tumbuhan
 - Karantina Hewan
- Bimbingan Teknis
- Evaluasi

- PETERNAKAN
- Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Perbibitan Ternak, Antara lain:
 - Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit

Ternak, Surat Rekomendasi & Pemasukan/ Pengeluaran Pakan Ternak
Budidaya Ternak
Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

Bimbingan Teknis

Evaluasi

PERKEBUNAN

Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Tanaman Semusim

Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
Perbenihan Tanaman Semusim
Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
Pemberdayaan Tanaman Semusim

Tanaman Rempah & Penyegar

Identifikasi dan Pendayagunaan



Sumber Daya Tanaman Rempah
& Penyegar

Perbenihan Tanaman Rempah &
Penyegar

Budidaya Tanaman Rempah &
Penyegar

Pemberdayaan dan Kelembagaan
Tanaman Rempah & Penyegar

Tanaman Tahunan

Identifikasi dan
Pendayagunaan Sumber Daya,
Tanaman Tahunan

Perbenihan Tanaman Tahunan

Budidaya Tanaman Tahunan

Pemberdayaan dan Kelembagaan
Tanaman Tahunan

Perlindungan Perkebunan

Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tanaman Semusim, Perlindungan
Perkebunan

Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tanaman Rempah dan Penyegar

Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tanaman Tahunan

Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran

Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Pascapanen Tanaman Semusim,
Rempah dan Penyegar

Pascapanen Tanaman Tahunan

Bimbingan Usaha dan
Perkebunan Berkelanjutan

Gangguan Usaha dan Penanganan
Konflik

Bimbingan Teknis Perkebunan



Evaluasi Perkebunan

PERINDUSTRIAN

Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Iklm Usaha dan Kerja Sama

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Promosi Industri

Industri Manufaktur

Promosi Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Standarisasi dan Teknologi

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Hak dan Kekayaan Intelektual

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Industri Hijau

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Analisis Kerja Sama Industri Unggulan
Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti



Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan Kawasan
Industri

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
Standarisasi

- 500.9.12.1 Standar
- 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
- 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi

Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Pengkajian dan Penerapan
Kebijakan Teknologi Industri
Pengkajian dan Penerapan Inovasi
Teknologi Industri
Pengembangan Hak Kekayaan
Intelektual

Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Rekomendasi Kegeologian

Mitigasi Gunung Api, Gempa
Bumi, Tsunami, dan Gerakan
Tanah

Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan

Pertambangan



Panas Bumi

Geosains

Pengukuran Time Domain

Electromagnetic (TDEM)

Kelayakan Lingkungan

Penelitian Kegeologian

Administrasi pelaksanaan penelitian

Administrasi tenaga penelitian

Administrasi penggunaan peralatan
penelitian

Log-book peralatan

survei/peralatan uji/kalibrasi

Hasil penelitian dan penyelidikan
kegeologian

Sumber Daya Geologi

Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi

Survei Geologi

Inventarisasi dan evaluasi kegeologian

Sumber Daya Geologi

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi

Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan

Survei Geologi

Konservasi

Administrasi Pelayanan Kegeologian dan

Penyajian Data dan
Informasi

Peta potensi dan sebaran

Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan

Mitigasi Bencana Gunungapi,
Gerakan Tanah, Gempa Bumi
dan Tsunami, Semburan
Lumpur/Gas serta kebakaran
Batubara

Survei Geologi
Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Rencana Induk Jaringan Gas
Bumi
Rencana dan Realisasi Investasi
Penetapan Harga Minyak Mentah
Penetapan Bagii Hasil
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Minyak dan Gas Bumi
Pelaksanaan Pemeriksaan dan
Pengujian PNBP
Verifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
Rekomendasi
Kemampuan Produksi Barang dan
Jasa Dalam Negeri
Rencana Kebutuhan Impor
Barang (RKIB) dan Rencana
Impor Barang(RIB)
Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Penyiapan dan Penawaran Wilayah
Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi
(Konvensional dan Non
Konvensional)
Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
(antara lain: Pemanfaatan Data
Migas untuk presentasi makalah,
publikasi makalah, pembukaan
data, Izin Pengiriman Data ke Luar
Negeri, Izin Pengiriman Data ke
Luar Negeri, Unitisasi Lapangan
Minyak dan Gas Bumi,
Rekomendasi Pengalihan Interest,
Rekomendasi Penyisihan Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi,
Penyiapan Dokumen Pengakhiran
Kontrak, Laporan Data Survei
Seismik, Laporan Data Pemboran

Sumur Eksplorasi per semester,
Laporan Data Pemboran Sumur
Eksplorasi Tahunan)

Eksplorasi Minyak dan Gas
Bumi (antara lain: Rekomendasi
Penggunaan Data Eksploitasi
(publikasi makalah, analisa
laboratorium, Reprocessing),
Penetapan Pengusahaan Minyak
Bumi dari Sumur Tua, Penetapan
Pengusahaan Lapangan Produksi
yang Dikembalikan Kepada
Pemerintah, Buku Cadangan
Minyak dan Gas Bumi, Data
Cadangan Strategis/Penyangga
Minyak dan Gas Bumi, Laporan
Hasil Pemantauan Data Produksi
Minyak dan Gas Bumi, Laporan
Hasil Inventarisasi Mutu Minyak
dan Gas Bumi)

Pengembangan lapangan Minyak
dan Gas Bumi (POD)

Perpanjangan Kontrak KKS

Penetapan Alokasi dan Harga Gas
Partisipasi Interest

Tumpang Tindih Lahan

Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Perumusan pedoman,
prosedur, layanan serta
pengawasan Usaha Pengolahan,

Pengangkutan,

Penyimpanan, dan Niaga Minyak
Bumi dan Gas Bumi, Hasil
Olahan dan Bahan Bakar Lain,

Antara lain: Pedoman
dan Prosedur, Layanan
Usaha

(Izin/rekomendasi/penandasahan)

, Pengawasan

Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Teknik dan Lingkungan

Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain:

Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT

Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)

Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las

Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain:

Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain:

Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala



Teknik Tambang Hulu dan Hilir,
Antara lain: Dokumen
Permohonan Pengajuan
persetujuan penunjukkan Calon
kepala/wakil kepala teknik
tambang minyak dan gas bumi,
Surat Undangan Presentasi,
Makalah Presentasi, Surat
Persetujuan/ Pengesahan
penunjukan kepala/wakil Kepala
Teknik Tambang Minyak dan Gas
Bumi

Penghargaan Keselamatan Kerja,
Antara lain: surat Permohonan
Mendapatkan Penghargaan, Surat
Penugasan Dalam Rangka
Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi
Verifikasi, Salinan Tanda
Penghargaan, Dokumen Pengajuan
dan penilaian Tanda Penghargaan
Keselamatan Minyak dan Gas
Bumi

Usaha penunjang

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Perencanaan Program Kerja
Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Pengadaan

Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan Infrastuktur
Minyak dan Gas Bumi

Penyiapan Program Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi



Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
Usul Program Aneka Energi
Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi

500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT

500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT

500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi

500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT

Panas Bumi

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan

Rekomendasi Bahan Peledak

Perizinan penggunaan gudang bahan peledak

Izin Tangki Bahan Bakar Cair

500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las

Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las

Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)

Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)

Penetapan kapasitas usaha panas bumi

Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi

Pelaksanaan Kerja Sama Panas

Bumi

Inventarisasi, Verifikasi dan

Evaluasi Obvitnas Bidang Panas

Bumi

Monitoring Pelaksanaan Program

Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM) pada Kegiatan

Pengusahaan Panas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan Investasi

Panas Bumi

Bioenergi

Penerbitan Izin Usaha Niaga

Bahan Bakar Nabati (BNN)

Pengadaan Bahan Bakar Nabati

(BBN)

Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Import

Penetapan Indeks Harga Pasar

BBN(HIP BBN)

Evaluasi/Revisi HIP BBN 500.10.13.6

Database Pengusahaan Bioenergi

500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai

Pengelola Energi Biomassa atau

Biogas untuk Pembangkit Listrik

Penetapan Spesifikasi Bahan

Bakar Nabati

Usul Program Bioenergi

Pemerintah Daerah dan Lembaga

Aneka Energi

Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi 500.10.14.2

Penetapan Kapasitas Usaha

500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing

Rekomendasi Persetujuan

Perubahan Pemegang Saham

Persetujuan

Rencana



Impor Barang (RIB)

Konservasi Energi

Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi

Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast

Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi

Penyusunan emisi energi gas rumah kaca

Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi

Profil investasi efisiensi energy500.10.15.9

Investment Grade Audit (IGA)

500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE

Usul Pembangunan

Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur

Bidang EBTKE

Evaluasi Program Kerja

Bina Program Tenaga Listrik

Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain:

Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu Data dan Informasi Ketenagalistrikan

Bina Usaha Ketenagalistrikan

Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin Harga dan Subsidi Listrik Hubungan komersial tenaga listrik Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti

tingkat mutu pelayanan PT PLN
(Persero)

Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Penyiapan kompetensi dan
pengawasan tenaga teknik
ketenagalistrikan

Usaha penunjang
ketenagalistrikan, Antara lain:
Dokumen Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL), Dokumen Izin
Pemanfaatan Jaringan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan
Telematika (IPJ Telematika),
Dokumen Penandasahan Rencana
Impor Barang (RIB)

Perlindungan lingkungan
ketenagalistrikan, Antara lain:
Dokumen forum keselamatan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik,
Dokumen pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup sektor
ketenagalistrikan,

Sertifikasi

Dokumen Sertifikasi Produk
peralatan dan pemanfaatan tenaga
listrik

Dokumen Penunjukan Lembaga
Sertifikasi Kompetensi (LSK)

Dokumen Penerbitan Sertifikasi
Laik Operasi (SLO) Instalasi
Tenaga Listrik

Dokumen Pembinaan dan
pengawasan sertifikat laik operasi
(SLO) instalasi tenaga listrik

Registrasi Sertifikasi



Akreditasi Ketenagalistrikan

Standarisasi Kompetensi

Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang
Ketenagalistrikan

Perumusan rancangan SNI bidang
ketenagalistrikan

Forum konsensus rancangan SNI
bidang ketenagalistrikan

Program pemberlakuan SNI wajib
bidang ketenagalistrikan

Dokumen pengawasan penerapan
SNI wajib bidang ketenagalistrikan

Standardisasi Usaha Penunjang

Ketenagalistrikan

Klasifikasi usaha penunjang
ketenagalistrikan

Kualifikasi usaha penunjang
ketenagalistrikan

Dokumen penunjukan LIT
(Lembaga Inspeksi Teknis)

Laporan berkala pemegang
penunjukan LIT

Laporan hasil pengawasan
penunjukan

Bina Program Mineral dan Batubara

Penyiapan dan Perencanaan
Program Mineral dan Batubara
Rencana Induk Mineral dan
Batubara

Pengembangan Investasi dan
Kerja Sama Bidang Mineral dan
Batubara

Data dan Informasi Mineral dan Batubara

Pelaporan Program Mineral dan
Batubara

Perencanaan, Penyiapan dan
Penawaran Wilayah Kerja (WK)



Mineral dan Batubara melalui lelang reguler

Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara

Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara

Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

Pembinaan Pengusahaan Mineral

500.10.26.1 Ketenagakerjaan

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral

Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral

Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)

Perizinan usaha pertambangan mineral

Kontrak Karya (KK)

Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral

Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)

Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral

Pedoman/petunjuk teknis
pertambangan mineral termasuk
rancangan awal sampul dengan
rancangan akhir

Pelaporan usaha pertambangan
mineral

Penghargaan usaha pertambangan
mineral

Penerbitan sertifikat clear and
clean (CnC) Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Mineral

Pembinaan Pengusahaan Batubara

500.10.27.1

Ketenagakerjaan

Pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang

Penyelesaian perselisihan usaha
pertambangan batubara

Rekomendasi kegiatan usaha
pertambangan batubara

500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi
batubara

500.10.27.6 Pengawasan produksi dan
pemasaran batubara (bitumen
padat, batuan aspal, batubara dan
gambut), Antara lain: Laporan
Produksi dan Penjualan Batubara
PKP2B, IUP hingga Laporan
Kontrak Penjualan Pertambangan
Batubara

Perizinan Usaha Pertambangan
Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan
Batubara (PKP2B)

Pengelolaan Barang Perjanjian
Karya Pengusahaan Batubara
(PKP2B), Antara lain: Persetujuan
Pengadaan Barang Modal
(Masterlist)

Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Teguran kepada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara

Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

Pelaporan usaha pertambangan batubara

Penghargaan usaha pertambangan batubara

Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan

Standar Nasional Indonesia)/

RSKKNi (Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia), Antara lain: Draft

Rancangan, Rancangan Standar

Nasional

Pengawasan Standardisasi

Persetujuan Penunjukkan
Kepala/Wakil Kepala Teknik
Tambang
Pengawasan Keselamatan Kegiatan
dan Keselamatan Pekerja, Antara
lain: Laporan Kecelakaan
Tambang/Statistik hingga Laporan
Hasil Pemeriksaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
Pemeriksaan teknis dan
pengujian instalasi dan peralatan
tambang, Antara lain: Pemeriksaan
dan Pengujian Instalasi dan
Peralatan
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)
Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)
Rekomendasi bahan kimia
Pengawasan Pelaksanaan
Pengelolaan Pemantauan
Lingkungan, Antara lain: Laporan
Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan
(RKL)/Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) hingga Surat
Penetapan Jaminan Pasca
Tambang
Laporan berkala teknik dan
lingkungan pertambangan/
laporan tahunan, Antara lain:
Laporan Bulanan Terjadinya
Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan
reklamasi
Pemberian Penghargaan, Antara
lain: Pemberian Penghargaan
Lingkungan Pertambangan,

Pemberian Penghargaan
Keselematan Kerja, Dokumen
Pengajuan dan Penilaian Tanda
Penghargaan lingkungan
Pertambangan, Dokumen
Pengajuan dan Penilaian Tanda
Penghargaan Keselamatan
Pengawasan lingkungan
pertambangan
Usaha Jasa Mineral dan Batubara
Pembinaan dan pengawasan
usaha jasa mineral dan batubara
Rekomendasi Teknis, Antara lain:
Pengajuan Rekomendasi Teknis,
Hasil Evaluasi
Persetujuan Teknis, Antara lain:
Pengajuan Persetujuan Teknis,
Hasil Evaluasi
Pengawasan Teknis
Pengawasan Konservasi Mineral
dan Batubara
Peminaan Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara, Antara
lain: Sosialisasi Standardisasi,
Bimbingan Teknis

Program Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan
Pengembangan
Pengembangan dan inovasi
Dokumen
penerapan/pemanfaatan/pendayagu
naan/replikasi/prototype hasil
penelitian/ pengkajian/
pengembangan/inovasi
Advokasi dan fasilitasi penelitian,
pengembangan dan inovasi
Diseminasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Pembinaan

penelitian/Pengembangan,

pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Jaringan Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Data dan informasi hasil

penelitian, pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Master proceeding/ jurnal

penelitian, pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Hak atas kekayaan intelektual

(HaKI)

Forum komunikasipenelitian,

pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Layanan jasa penelitian,

pengembangan, penerapan IPTEK

Sertifikasi personil peneliti

bidang Sumber Daya Mineral

Sarana Litbang

Administrasi penggunaan peralatan

Log-book Peralatan

Survei/Peralatan Uji Kalibrasi

Afiliasi

Proyek Percontohan

Promosi dan Layanan Jasa

Teknologi

Pembinaan Penelitian dan

Pengembangan

Penyajian Informasi

Penelitian dan Pengembangan Kegeologian



Pemetaan dan penelitian
geologi, geokimia, dan geofisika
kelautan

Energi Kelautan dan Kewilayahan
Penelitian Energi dan kewilayahan
pantai

Penelitian sumber daya energi dan
mineral kelautan

Penelitian Sumber Daya Mineral
Kelautan

Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Minyak dan Gas Bumi

Teknologi Eksplorasi

Teknologi Eksploitasi

Laboratorium

Study

Teknologi Proses

Teknologi Aplikasi

Produk

Teknologi Gas

Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral Batubara

Teknologi Eksploitasi Tambang dan
Pengolahan Sumber Daya

Teknologi Pengolahan dan
Pemanfaatan mineral

Teknologi Pemanfaatan Batubara

Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Energi baru terbarukan 500.10.36.2

Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan
Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah) dan Konservasi
Energi

PERHUBUNGAN



Kebijakan di bidang Perhubungan yang
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Jaringan Prasarana dan Pelayanan

Penentuan lokasi terminal barang
tipe pengumpul dan tipe
penunjang

Penentuan lokasi terminal
penumpang tipe A, tipe B, dan tipe
C

Penetapan lokasi terminal barang
utama

Standar pelayanan minimal
pengoperasian terminal

Jaringan trayek angkutan antar
kota/provinsi

Jaringan lintas pada jaringan
jalan primer

Penetapan kelas jalan primer

Kualifikasi teknis petugas terminal

Jaringan transportasi jalan
sekunder

Pengembangan Transportasi Jalan

Sistem informasi dan komunikasi
lalulintas dan angkutan jalan

Pengembangan transportasi jalan

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengesahan hasil uji tipe
kendaraan bermotor

Sertifikasi uji tipe kendaraan
bermotor

Sertifikasi tenaga penguji
kendaraan bermotor

Akreditasi unit pengujian
kendaraan bermotor

Teknologi Kendaraan Bermotor

Sertifikasi rancang bangun dan
rekayasa kendaraan bermotor

Pelaksanaan kalibrasi



peralatan uji kendaraan bermotor

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

Perlengkapan Jalan

Pedoman teknis perlengkapan jalan
Penimbangan kendaraan bermotor di jalan

Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor

Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

Angkutan Penumpang

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara

Izin trayek antar kota antar provinsi

Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi

Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum

Pemberian subsidi angkutan umum
Angkutan perintis
Penghargaan perusahaan
angkutan umum

Angkutan Barang

Sistem informasi dan komunikasi
lalulintas dan angkutan jalan
Tarif angkutan barang
Izin operasi angkutan barang
tertentu
Pembinaan angkutan barang
Izin dispensasi angkutan jalan

Monitoring Operasional

Pengendalian operasional Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Pengawasan, penertiban dan
pemberian sanksi administratif
terhadap pelanggaran operasional
kendaraan angkutan umum yang
menjadi kewenangan
Berkas Pelanggaran Perda

Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pedoman Teknis
Penyidikan pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Bimtek PPNS
Pengusulan pengangkatan dan
pemberhentian Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)

Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan

Penyeberangan
Pendataan jaringan transportasi
sungai, danau, dan
penyeberangan

Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai,

danau dan penyeberangan

Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Manajemen lalu lintas

Tata cara berlalu lintas di
sungai, danau dan penyeberangan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
bidang lalu lintas dan angkutan
sungai & danau

Sertifikasi inspektur sungai dan
danau dan pejabat

pemberangkatan angkutan sungai
dan danau

Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai,
Danau dan Penyeberangan

Pengerukan alur pelayaran
sungai, danau dan kolam
pelabuhan penyeberangan

Penetapan kelas alur dan peta alur
pelayaran sungai dan danau

Perambuan sungai, danau dan
penyeberangan

Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan

Penyelenggaraan angkutan sungai,
danau dan penyeberangan

Persetujuan operasi kapal
penyeberangan di lintas nasional
dan internasional

Tarif dan Keperintisan

Perhitungan tarif, pemantauan
tarif angkutan dan jasa pelabuhan
sungai, danau dan penyeberangan

Kriteria dan pelaksanaan
pelayanan keperintisan

Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi

Perkotaan 500.11.22.2

Transportasi

perkotaan yang



berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan

500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

Lalu Lintas Perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

Angkutan Perkotaan

Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek

Jaringan trayek perkotaan

Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan

Perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi

provinsi

Dampak Transportasi Perkotaan

Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

Masterplan transportasi perkotaan

Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

Monitoring dan evaluasi data Kecelakaan

Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27.3

Pengembangan sistem informasi

manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

Pengembangan Keselamatan

Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

Harmonisasi kebijakan

Promosi dan Kemitraan Keselamatan

Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

Kemitraan keselamatan antar



lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

Bina Keselamatan Angkutan Umum

Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

Audit Keselamatan

Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

Inspeksi Keselamatan

Pedoman keselamatan
Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

Parkir

Surat Tugas Juru Parkir
Izin tempat khusus parkir swasta
Surat Tugas TKP Pemerintah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Telekomunikasi

Layanan Jaringan Telekomunikasi
Layanan Jasa Telekomunikasi
Penomoran Telekomunikasi dan
Informatika
Kelayakan Sistem Telekomunikasi

Penyiaran

Pemetaan Penyelenggaraan Radio
dan Televisi
Database Penyelenggaraan Radio
dan Televisi

Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan

Kewajiban Universal
Telekomunikasi Khusus
Pemerintah Daerah
Telekomunikasi Khusus Non
Pemerintah Daerah
Layanan Khusus Penyiaran
Pelayanan Kewajiban Universal
Pengembangan Infrastruktur

Pengendalian Informatika

Monitoring dan Evaluasi Jaringan
Telekomunikasi
Monitoring dan Evaluasi Jasa
Telekomunikasi
Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
Pencegahan dan Penertiban

e- Government

Tata Kelola e-Government
Teknologi dan Infrastruktur e-
Government
Interoperabilitas dan
Interkonektivitas e-Government
Aplikasi Layanan Pemerintahan
Aplikasi Layanan Publik



e- Business

Tata Kelola e-Business

Teknologi dan Infrastruktur e-Business

Interoperabilitas dan

Interkonektivitas e-Business

Aplikasi Layanan e-Business

Pemberdayaan Informatika Masyarakat

Pemberdayaan Informatika

Masyarakat Perkotaan

Pemberdayaan Informatika

Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Industri Informatika

Industri Infrastruktur dan

Layanan Aplikasi Informatika

Industri Perangkat Informatika

Pengguna

Industri Perangkat Lunak

Industri Konten Multimedia

Keamanan Informasi

Tata Kelola Keamanan Informasi 500.12.10.2

Teknologi Keamanan Informasi 500.12.10.3

Monitoring, Evaluasi dan Tanggap

Darurat Keamanan Informasi

500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan

500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi

Komunikasi Publik

Tata Kelola Komunikasi

Publik

Pengelolaan Opini Publik

Layanan Komunikasi Publik

Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Informasi Politik, Hukum, dan
Keamanan

Informasi Perekonomian

Informasi Kesejahteraan

Rakyat

Pengelolaan Media Publik

Media Cetak

Media Online

Media Luar Ruang dan Audio

Visual

Kemitraan Komunikasi

Kemitraan Pemerintah dan

Lembaga Negara

Kemitraan Media dan Dunia Usaha

Kemitraan Organisasi

Kemasyarakatan dan Profesi

Infrastruktur Informatika

Jaringan

Piranti Teknologi

Informatika

Keamanan Informatika

Sistem dan Data

Portal dan Konten

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengembangan Aplikasi

Pusat Kerjasama

Kerja Sama daerah

Kerja Sama Bilateral

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1 Pelayanan

Informasi 500.12.18.2

Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

Evaluasi

**PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF**

Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Pengembangan Destinasi Wisata

Perancangan Destinasi dan

Investasi Pariwisata

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Industri Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat



Destinasi Pariwisata



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembangan Wisata Minat
Khusus, Konvensi, Insentif, dan
Event

Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Pasar dan
Informasi Pariwisata
Promosi Pariwisata Luar Negeri
Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Pencitraan Indonesia

Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Pengembangan industri Perfilman
Pengembangan Seni Pertunjukan
dan Industri Musik
Pengembangan Seni Rupa

Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan

IPTEK

Pengembangan Ekonomi Kreatif
Berbasis Media

Desain dan Arsitektur

Kerjasama dan Fasilitas

**Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif**

Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Kepariwisata

Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Ekonomi Kreatif

Pengembangan SDM

Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kompetensi Kepariwisata dan
Ekonomi Kreatif

STATISTIK

Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

Perencanaan

Persiapan, Antara lain:

Penyusunan rancangan organisasi



kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

Diseminasi hasil sensus Survei
Perencanaan



Persiapan

Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan Diseminasi hasil Survei

Konsolidasi Data Statistik

Kompilasi Data

Analisis data

Penyusunan Publikasi

Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

KETENAGAKERJAAN

Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Tenaga Kerja

Perusahaan Pemerintah

Perencanaan Tenaga Kerja

Perusahaan Swasta

Pengembangan Standarisasi Kompetensi

Penerapan Standar Kompetensi



Pengembangan

Standarisasi Kompetensi

Pengembangan Program Pelatihan
Ketenagakerjaan

Pengembangan Program Pelatihan
Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan Program Pelatihan
Ketrasmigrasian

Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja

Akreditasi dan Sistem Informasi
Kelembagaan

Pengembangan Sarana dan
Fasilitas Lembaga Pelatihan

Pengembangan Standar Mutu
(PSM) Lembaga Pelatihan

Sistem Pendanaan dan Kerjasama
Antar Lembaga

Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

Instruktur dan PSM Lembaga
Pelatihan Pemerintah

Instruktur Lembaga Pelatihan
Swasta

Tenaga Pelatihan

Sistem Informasi Instruktur, PSM,
dan Tenaga Pelatihan

Bina Pemagangan

Pemagangan Dalam Negeri

Pemagangan Luar Negeri

Perizinan dan Advokasi Pemagangan

Promosi dan Jenjang Pemagangan

Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan

Promosi dan Kerjasama

Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan Sistem dan

Peningkatan Produktivitas

Pengembangan Pengukuran dan

Kajian Produktivitas



Pengembangan Kewirausahaan
Pengembangan Pasar Kerja
Informasi Pasar Kerja
Analisis Pasar Kerja
Bursa Kerja
Analisis Jabatan
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Antar Kerja
Penempatan Tenaga Kerja Khusus
Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan
Pemberdayaan Pengantar Kerja
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Tenaga Kerja
Sektor Informal 500.15.10.1
Tenaga Kerja
Mandiri dan
Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan
Kerjasama Antar Lembaga
Standardisasi Profesi
Sistem Informasi dan Registrasi
Pembakuan Akreditasi
Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis
Diskriminasi
Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian Kerjasama Bersama
Perjanjian Kerja
Kesejahteraan Pekerja
Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
Kelembagaan dan Pemasarakatan
Hubungan Industrial
Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3 Pemasarakatan Hubungan
Industrial
Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Pengupahan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dalam Hubungan Kerja
Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian
Hubungan Industrial
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial
Penyelenggaraan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Tenaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Pengawasan Norma Kerja
Pengawasan Norma Hubungan
Kerja dan Perlindungan Berserikat
Pengawasan Norma Penempatan
dan Latihan Tenaga Kerja
Pengawasan Norma Kerja
Perempuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja
Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan
dan Anak
Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pengawasan Norma Mekanik,
Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Pengawasan Norma Konstruksi
Bangunan, Listrik dan
Penanggulangan Kebakaran
Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
Pengawasan Norma Lingkungan
Kerja dan Bahan Berbahaya
Pengawasan Norma

Kelembagaan, Keahlian dan Sistem
Manajemen K3
Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
Bina Penegakan Hukum
Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan
Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
Pengembangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
Kerjasama Penegakan Hukum
Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) 500.15.21.1 Analisis dan
Standardisasi bidang K
3
Hasil kajian, perekayasaan dan
penerapan teknologi dan alih
teknologi K 3
Bimbingan Teknis dan Evaluasi
Pengkajian K 3
Bimbingan Teknis dan Evaluasi
Pelayanan K3
Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1 Program,
Analisis dan
Standardisasi Pengembangan SDM
dan Kompetensi K3
Penyebarluasan Informasi
Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Kerjasama Tingkat Nasional
Bidang Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Kerjasama Tingkat Regional
Bidang Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Kerjasama Tingkat Internasional
Bidang Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3

PENANAMAN MODAL

Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Perencanaan Penanaman Modal

Perencanaan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya
Perencanaan Industri Manufaktur
Perencanaan Jasa dan Kawasan
Perencanaan Infrastruktur

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Deregulasi Penanaman Modal
Pengembangan Potensi Daerah
Pemberdayaan Usaha
Pemberdayaan Usaha Pembinaan
dan Penyuluhan
Pemberdayaan Usaha Kemitraan
Usaha
Pemberdayaan Usaha Pelayanan
Usaha

Promosi Penanaman Modal

Pengembangan Promosi
Analisis Strategi Promosi
Fasilitasi Promosi Luar Negeri
Promosi Sektoral
Fasilitasi Promosi Daerah
Pameran dan Sarana Promosi

Kerja Sama Penanaman Modal

Kerja Sama Bilateral dan
Multilateral
Kerja Sama Regional
Kerja Sama Dunia Usaha
Internasional

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan Penanaman Modal
Data Realisasi Penanaman Modal



Bimbingan Sosialisasi Ketentuan
Penanaman Modal
Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Pengawasan Penanaman Modal
Pencabutan/Pembatalan Perizinan
Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Aplikasi
Pelayanan Perijinan
Pelayanan Konsultasi Perijinan
Pelayanan Non Perijinan
Pelayanan Fasilitas

PERTANAHAN

Kebijakan di bidang Pertanahan yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Pengadaan dan Penataan Administrasi
Pertanahan

Fasilitasi Pengadaan Tanah
Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Pertanahan
Data dan Informasi Pertanahan
Advokasi dan Pengendalian

Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
Penatagunaan Tanah
Data dan Pemetaan Tematik
Penguatan Atas Tanah

Sengketa Tanah

Pengkajian dan Penanganan
Sengketa
Advokasi dan Pengendalian
TRANSMIGRASI

Kebijakan di bidang Transmigrasi yang
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Fasilitasi Pengadaan Tanah
Pengurusan Legalitas Tanah
Dokumentasi Pertanahan

Advokasi Pertanahan

Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur

- Kawasan Transmigrasi
- Penyiapan Lahan
- Penyiapan Sarana
- Penyiapan Prasarana
- Evaluasi Kelayakan Permukiman

Fasilitas Penempatan Transmigrasi

- Penyiapan Calon Transmigrasi
- Penyiapan Perpindahan
- Pelaksanaan Perpindahan
- Penataan dan Adaptasi

Partisipasi Masyarakat

- Promosi dan Motivasi
- Kerjasama Kelembagaan
- Kerjasama Antar Daerah
- Pelayanan Investasi

Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

- Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- Bina Sistem Informasi
- Perencanaan Pengembangan Kawasan
- Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat

- Bantuan Pangan dan Kesehatan
- Fasilitas Sosial Budaya
- Pengembangan Kelembagaan
- Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

Pengembangan Usaha

- Kewirausahaan
- Produksi

Pengolahan Hasil dan Pemasaran
Lembaga Ekonomi dan permodalan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
Analisis dan Standarisasi Sarana
dan Prasarana
Pengembangan Sarana
Pengembangan Prasarana
Evaluasi Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Penyerasian Lingkungan
Persiapan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan
Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
Evaluasi Perkembangan
Permukiman Transmigrasi
Evaluasi Perkembangan Pusat
Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

PEKERJAAN UMUM

Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Penatagunaan Sumber Daya Air

Perencanaan Wilayah Sungai
Kelembagaan
Pemanfaatan Sumber Daya Air
Hidrologi dan Lingkungan Sumber
Daya Air
Pengaturan dan Pemantauan

Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Perencanaan Pengelolaan Sumber
Daya Air
Manajemen Mutu
Informasi dan Data Sumber Daya
Air
Keterpaduan Pemrograman

Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sungai dan Pantai



Pengelolaan Irigasi dan Rawa
Pengelolaan Bendungan, Danau,
Situ, dan Embung
Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Operasi dan Pemeliharaan Sungai
dan Pantai
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
dan Rawa
Operasi dan Pemeliharaan
Bendungan, Danau, Situ, dan
Embung
Operasi dan Pemeliharaan Air
Tanah dan Air Baku
Operasi dan Pemeliharaan
Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal
Lingkup Nasional)
Perencanaan Pengendalian
Lumpur Sidoarjo
Pemrograman Pengendalian
Lumpur Sidoarjo
Pelaksanaan Pengendalian Lumpur
Sidoarjo
Pengendalian Dampak Sosial,
Ekonomi, dan Lingkungan akibat
Lumpur Sidoarjo
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Pengembangan Jaringan Jalan
Keterpaduan Perencanaan
Sistem Jaringan Jalan
Lingkungan dan Keselamatan
Jalan
Pembangunan Jalan
Standar dan Pedoman
Manajemen Konstruksi
Pengelolaan Gedometrik,

Perkerasan, dan Drainage
Pengelolaan Geoteknik dan
Manajemen Lereng

Preservasi Jalan

Standar dan Pedoman
Perencanaan Teknis
Teknik Rekonstruksi
Teknik Pemeliharaan Jalan

Pengelolaan Jembatan

Standar dan Pedoman
Perencanaan Teknis
Teknik Jembatan
Teknik Terowongan dan Jembatan
Khusus

Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan,

Perkotaan, dan Fasilitas
Jalan Daerah
Bimbingan Teknik Jalan Daerah
Pengembangan Jalan Metropolitan
dan Kota Besar
Pembinaan Teknik Jalan Bebas
Hambatan

Pengaturan Jalan Tol

Persiapan pengusahaan jalan tol
Pengadaan Investasi Jalan Tol
Teknik Pengaturan Jalan Tol
Pengambilalihan hak pengusahaan
jalan tol

Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Keterpaduan Perencanaan dan
Kemitraan
Keterpaduan Pembiayaan dan
Pelaksanaan

Pengembangan Kawasan Permukiman

Perencanaan Teknis
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Pedesaan
Kawasan Permukiman Khusus
Kelembagaan

Pembinaan Penataan Bangunan

Perencanaan Teknis

Penataan Bangunan Gedung

Pengelolaan Rumah Negara

Penataan Bangunan dan

Lingkungan Khusus

Kelembagaan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Perencanaan Teknis

Sistem Penyediaan Air Minum

Perkotaan

Sistem Penyediaan Air Minum

Pedesaan

Sistem Penyediaan Air Minum

Khusus

Kelembagaan

Peningkatan Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan Laboratorium dan

Bengkel Kerja

Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Perencanaan Teknis

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Penyehatan Lingkungan

Permukiman Khusus

Kelembagaan

Pengelolaan Laboratorium dan

Bengkel Kerja

Pemantauan dan Evaluasi

**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN**

Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman yang

dilakukan oleh Pemerintah

Daerah

Perencanaan Pembiayaan Perumahan

Keterpaduan Perencanaan



Strategi Pembiayaan dan Analisa
Pasar Perumahan
Kemitraan

Pola Pembiayaan Perumahan

Pola Pembiayaan Perumahan
Rumah Umum
Pola Pembiayaan Perumahan
Rumah Swadaya dan Mikro
Perumahan
Pola Investasi Perumahan

Pendayagunaan Sumber Pembiayaan

Perumahan
Sumber Pembiayaan Primer
Sumber Pembiayaan Sekunder
Sumber Tabungan Perumahan
Pembiayaan Lainnya
Sistem Pembiayaan Perumahan
Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan

Perencanaan Penyediaan Perumahan

Keterpaduan Perencanaan
Analisa Teknik
Rencana Pengembangan
Lingkungan Hunian
Kemitraan dan Kelembagaan

Penyediaan Rumah Susun

Perencanaan Teknik
Penyediaan
Penghunian, Pengalihan, dan
Pemanfaatan
Pengelolaan

Penyediaan Rumah Khusus

Perencanaan Teknik
Penyediaan dan Pengelolaan
Rumah Tapak Khusus
Bimbingan teknis dan supervisi
Penyelenggaraan Bantuan Rumah
Swadaya

Perencanaan Teknik
Fasilitas Backlog Rumah Swadaya
dan Rumah Tidak Layak Huni
Pelaksanaan Bantuan Simultan
Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
Perencanaan Teknik
Pemberian Bantuan Rumah Umum
Fasilitas Hunian Berimbang
Fasilitas Penyediaan Lahan
Perumahan
Investasi Infrastruktur
Pelaksanaan Kebijakan Investasi
Infrastruktur
Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
Fasilitas dan Mitigasi Risiko
Investasi Infrastruktur
Pasar Infrastruktur
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sistem Penyelenggaraan
Kontrak Konstruksi
Konstruksi Berkelanjutan
Manajemen Mutu
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Kelembagaan
Material dan Peralatan Konstruksi
Teknologi Konstruksi dan Produksi
Dalam Negeri
Usaha Jasa Konstruksi
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Standar dan Materi Kompetensi
Penerapan Kompetensi
Pengembangan Profesi Jasa
Konstruksi
Pengembangan Produktivitas
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
Peningkatan Kerjasama
Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Peningkatan Jasa Konstruksi

Koordinasi dan Sinkronisasi

Rencana Kerja

Pelaksanaan Pengendalian Mutu

Penerapan Teknologi Konstruksi

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Kerjasama Penerapan Teknologi
Konstruksi

Pengembangan Materi

Pendayagunaan Material dan
Peralatan Konstruksi

Rencana Pengembangan Infrastruktur
Pekerjaan Perumahan Rakyat
(PUPR)

Antar Sektor

Antar Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis

Keterpaduan Infrastruktur
Kawasan Strategis

Pengembangan Infrastruktur
Antarkawasan Strategis

Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Metropolitan

Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Kota Besar dan Kota
Baru

Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

Analisa Manfaat dan Skema
Pembiayaan

Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Infrastruktur

Perumahan Rakyat (PUPR)

Pemantauan dan Evaluasi

TATA RUANG (TATA KOTA)

Kebijakan di bidang Tata Ruang yang
dilakukan Pemerintahan
Kabupaten Brebes



Perencanaan

Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RT/RW)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Rencana Tata Ruang Strategis
Kabupaten
Rencana Tata Bangun Lingkungan
(RTBL)
Rencana Pengembangan Sistem
Sarana dan Prasarana Kabupaten
Rencana Teknis Prasarana Kota
Rencana Teknis Rencana
Peremajaan dan Pengembangan
Kotas Prasarana Kota

Pemanfaatan dan Pengendalian

Evaluasi dan Pengawasan Penata
Ruang
Ijin Pemanfaatan Ruang
Pembatalan Ijin Pemanfaatan
Ruang

Pemetaan

Peta Dasar
Survey Pemetaan Ruang Darat
Survey Pemetaan Ruang Air
Survey Pemetaan Ruang Udara
LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Inventarisasi, Penerapan ekoregion,
dan rencana perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan

Evaluasi Pemanfaatan Sumber
Daya Alam

Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Evaluasi Penerapan

Perencanaan Lingkungan Hidup

Ekonomi Lingkungan

Dampak Lingkungan

Bimtek Dampak Lingkungan

Penerapan sistem kebijakan

Dampak lingkungan

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan dan Pengawasan

Manufaktur Prasarana dan Jasa

Pertambangan Energi, Minyak dan
Gas

Agro Industri dan Usaha Skala
Kecil

Udara Sumber Bergerak

Evaluasi dan Pengembangan

Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
Pertambangan Energi, Minyak dan
Gas

Agro Industri dan Usaha Skala
Kecil

Udara Sumber Bergerak

Keanekaragaman Hayati dan pengendalian

Kerusakan Lahan

Pengembangan

Pemanfaatan

Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Keamanan Hayati

Pengendalian kerusakan Lahan

Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Kerusakan Ekosistem

Rawa

Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer

Perangkat mitigasi

Inventarisasi Emisi Gas Rumah

Kaca

Pengendalian Bahan Perusak Ozon

Pengendalian Kerusakan Akibat

Kebakaran Hutan dan Lahan

Adaptasi Perubahan Iklim



Perangkat Adaptasi Perubahan
Iklim antara lain: Pengembangan
perangkat Adaptasi
Perubahan Iklim, Pemantauan
dan Evaluasi Adaptasi
Perusahaan Iklim
Kerentanan Perubahan Iklim
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Registrasi dan Notifikasi
Pemantauan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan
Berbahaya dan beracun
Pengumpulan dan pemanfaatan
Pengangkutan dan Pengolahan
Penimbunan dan Dumping
Notifikasi dan Rekomendasi
Limbah Lintas batas
Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan
Kontaminasi Limbah B3
Pemantauan
Tanggap darurat dan pemeliharaan
Kontaminasi
Pengelolaan Sampah
Pembatasan sampah
Daur Ulang dan Pemanfaatan
Sampah
Pembentukan Dewan Adipura
Penetapan pemenang adipura
Hukum Administrasi Lingkungan
Pengelolaan dan pengembangan
pengaduan
Penataan hukum administrasi
lingkungan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Penyelesaian sengketa Melalui
Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan
diluar pengadilan

Penegakan hukum pidana lingkungan

Penyidikan

Koordinasi penuntutan, evaluasi,
dan tindak lanjut

Koordinasi pembinaan penyidik PNS

Komunikasi Lingkungan

Pengembangan Komunikasi

Publikasi dan Kampanye

Penguatan Inisiatif Masyarakat

Komunitas Pendidikan Lingkungan

Kearifan Lingkungan

Peningkatan Peran Masyarakat

Masyarakat Perkotaan

Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Sosial Masyarakat

Organisasi Profesi Dunia Usaha

Data dan Informasi Lingkungan

Pengelolaan Data

Pengelolaan Informasi

Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan Sistem dan

Layanan Jaringan

Kelembagaan Lingkungan

Kelembagaan dan Tata Laksana

Fasilitasi Standar Pelayanan

Minimal

Standarisasi dan teknologi

Standarisasi Manajemen dan dan

Pengujian Lingkungan

Standarisasi Kompetensi Keahlian

dan Lembaga Penyedia Jasa

Lingkungan

Teknologi Ramah Lingkungan

Pusat Sarana Pengendalian Dampak

Lingkungan

Pemantauan dan Kajian Kualitas
Lingkungan
Laboratorium Rujukan dan
Pengujian

700 PENGAWASAN

PENGAWASAN INTERNAL

Rencana Pengawasan

Rencana Strategis Pengawasan

Rencana Kerja Pengawas Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana dan Penetapan Kinerja
Tahunan

Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

Pelaksanaan Pengawasan

Laporan Hasil Audit (LHA),
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
Laporan Hasil Pemeriksaan
Operasional (LHPO), Laporan Hasil
Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan
(LA), Laporan Auditor Independen
(LAI) yang memerlukan tindak
lanjut (TL)

Laporan Hasil Audit Investigasi
(LHAI) yang mengandung unsur
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan
memerlukan tindak lanjut

Laporan Hasil Audit Investigasi
(LHAI) yang mengandung unsur
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan
tidak memerlukan tindak lanjut

700.1.2.4 Laporan Perkembangan
Penanganan Surat Pengaduan
Masyarakat

700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Temuan

Laporan Perkembangan Barang
Milik Negara

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan

Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan

Formasi dan Pengadaan Pegawai

Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN

Pengumuman Kelulusan ASN

Berkas Lamaran Yang Tidak
Diterima
Pengangkatan ASN
Open Bidding (Seleksi Terbuka
Jabatan)
Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi
ASN

Mutasi Pegawai

Usulan Alih Status, Pindah
Instansi, Pindah Wilayah Kerja,
Diperbantukan, Dipekerjakan,
Penugasan Sementara, Mutasi
antar Perwakilan, Mutasi ke dan
dari Perwakilan, Pemindahan
Sementara,
Persetujuan/Pertimbangan Kepala
BKN
Kenaikan
Pangkat/Golongan/Jabatan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Jabatan Struktural/Fungsional
Perubahan Data Dasar/
Status/Kedudukan Hukum
Pegawai
Peninjauan Masa Kerja
Badan Pertimbangan Jabatan dan
Pangkat (BAPERJAKAT)

Pengembangan Karir

Usulan Tugas Belajar/ Ijin
Belajar/ Diklat/ Kursus/
Magang/ Ujian Dinas/ Praktek
Kerja di Instansi lain/ Pertukaran
antar ASN dengan pegawai swasta
Penyesuaian ijazah
Penyusunan Sistem Karier
Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan
Penilaian Prestasi Kerja

Angka Kredit Antara lain:
Pengajuan Daftar Usul Pengajuan
Angka Kredit, Penilaian Daftar
Usul Pengajuan Angka Kredit

Kinerja Aparatur Sipil Negara

Hasil Penilaian Kinerja dan
Standar Kerja
Pengelolaan Database dan Analisis
Sistem Informasi Kinerja
Evaluasi dan Pemantauan
Penilaian Kinerja dan Standar
Kinerja

Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

Kode Etik Pegawai
Disiplin
Pemberhentian Dengan Hormat
Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat
Pemberhentian Sementara
Pensiun ASN Antara lain:
Administrasi Pensiun ASN,
Penetapan Pensiun ASN,
Penetapan Pertimbangan Teknis
Pensiun ASN, Pensiun Pejabat
Negara dan Janda/ Dudanya

Bantuan Hukum

Status dan Kedudukan Pegawai

Status Kepegawaian
Kedudukan Kepegawaian
Keberatan Pegawai
Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian

Pengolahan Data dan Informasi
Kepegawaian
Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian
Pengembangan Sistem Pengelolaan

- Arsip Kepegawaian Elektronik
- 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
- 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
 - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
 - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
 - 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
 - 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
 - 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
 - 800.1.11.2 Cuti Sakit
 - 800.1.11.3 Cuti Bersalin
 - 800.1.11.4 Cuti Tahunan
 - 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
 - 800.1.11.6 Cuti Besar
 - 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
 - 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
 - 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
 - 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
 - 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
 - 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan Kesejahteraan Pegawai Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Asuransi Pegawai/BPJS

Tabungan Perumahan
Bantuan Sosial
Pakaian Dinas
Layanan Pegawai yang Meninggal
Karena Dinas
Pemberian Tali Kasih
Pemberian Piagam Penghargaan
dan Tanda Jasa
Olahraga dan Rekreasi

Rekam Medis

Administrasi Perseorangan

Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Pejabat Negara dan pejabat
lainnya yang disetarakan
Sekretaris Daerah
ASN berjasa/terlibat dalam
peristiwa berskala nasional

Penilaian Kompetensi

Penilaian Kompetensi
Hasil Penilaian Kompetensi

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Sistem Informasi program dan
pembinaan diklat
Pedoman-pedoman kediklatan
Kurikulum-kurikulum diklat
Modul-modul diklat
Panduan fasilitator
Saran/rekomendasi
penyelenggaraan diklat
Notulen sosialisasi/Rapat
Koordinasi Kebijakan Diklat
Monitoring dan evaluasi program

dan pembinaan diklat
Konsultasi, advokasi, asistensi
diklat

Widyaiswara

Seleksi dan pengembangan
Widyaiswara
Sertifikasi Widyaiswara
Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
Penilaian Widyaiswara
Konsultasi, advokasi dan asistensi
Widyaiswara
Sistem Informasi Pembinaan
Widyaiswara

Penyelenggaraan Diklat

Perencanaan; peserta, pengajar,
penjadwalan Penyelenggaraan
Diklat
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Diklat
Konsultasi, advokasi, asistensi
penyelenggaraan diklat
Pengembangan bahan ajar dan
metodologi pembelajaran
Sistem informasi diklat
Monitoring Penyelenggara Diklat
Monitoring dan evaluasi Pasca
diklat

Alumni

900 KEUANGAN

KEUANGAN DAERAH

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P)
Penyusunan Prioritas Plafon
Anggaran (PPA)
Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKASKPD)

Penyampaian Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan
(RAPBD-P)

Penyusunan Anggaran

Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang)
kecamatan

Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) Kota
Rancangan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RDPA) SKPD yang
telah disetujui Sekretaris Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD yang telah disahkan
oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Pelaksanaan Anggaran

Surat Penyedia Dana (SPP, SPM
dan SP2D): UP, GU, TU, LS

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Daerah

Dokumen Penatausahaan

Keuangan

Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana

Daftar Gaji

Kartu Gaji

Data Rekening Bendahara Umum
Daerah (BUD)

Laporan Keuangan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Permohonan Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (Blue Book)



Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana

Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya

Dokumen Otorisasi Penarikan Dana(Payment Advice)

Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.

Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),

Staff Appraisal Report Report /Laporan

Laporan Hutang Daerah

Completion Report/Annual Report

Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar



Negeri (PHLN)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Manual Implementasi Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD)

Dokumen Kebijakan Akuntansi
Arsip Data Komputer dan Berita
Acara Rekonsiliasi

Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca Bulanan /Triwulanan
/Semesteran

Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

Surat Penetapan Pemimpin
Proyek/Bagian Proyek, Bendahara,
atas Penggunaan Anggaran
Kegiatan Pembantuan, termasuk
Specimen Tanda Tangan

Berkas Permintaan Pembayaran
(SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-
Daftar Perincian Penggunaan SPPR-
SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet
giro, SPM Nihil,

Penagihan/Invoice, Faktur Pajak,
Bukti Penerimaan Kas/Bank
beserta Bukti Pendukungnya a.l.:
Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit
Bank, Permintaan Pelayanan
Jasa/Service Report dan Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan

Buku Rekening Bank

Keputusan Pembukuan Rekening
Pembukuan anggaran terdiri
antara lain: Buku Kas Umum
(BKU), Buku Pembantu, Register
dan Buku Tambahan, Daftar
Pembukuan

Pencairan/Pengeluaran (DPP),
Daftar Himpunan Pencairan (DHP),



dan Rekening Koran

Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya

Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu,

Peraturan/Pedoman/Standar

Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk

Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu,

Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD

dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA

KPUD dan Panwas, Berkas

Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana

Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota,

Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada

KPUD dan Panwas Kota dan

Bantuan Biaya Pemilu dari APBD,

Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya

Pemilu dari APBD, Nota

Persetujuan DPRD tentang Perda

APBD Pilkada dan Bantuan Biaya

Pemilu dari APBD



**Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran
Biaya Bantuan Pemilu
Berkas Penetapan Bendahara dan
Atasan Langsung Bendahara
KPUD, Bendahara Panwasda dan
Bendahara pada Panitia Pilkada**

dan Pemilu

Berkas Penerimaan Komisi, Rabat
Pembayaran Pengadaan Jasa,
Bunga, Pelaksanaan
Pilkada/Pemilu

Berkas setor sisa dana
Pilkada/Pemilu termasuk setor
komisi pengadaan barang/jasa,
rabat, bunga, jasa giro Berkas
Penyaluran Biaya Pemilu termasuk
diantaranya Bukti Transfer Bank
Pedoman Dokumen Penyediaan
Pembiayaan Kegiatan Operasional
(PPKO) Pemilu termasuk
Perubahan/Pergeseran/Revisinya

Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
atas Laporan Keuangan
Hasil Pengawasan dan
Pemeriksaan Internal

900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa
Fungsional

900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian
Daerah

Anggaran Daerah

Anggaran Daerah

Dukungan Teknis Anggaran Daerah

Pendapatan dan Investasi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Antara lain: fasilitasi
pelaksanaan kebijakan
standardisasi pajak daerah dan
retribusi daerah, penyiapan bahan
perumusan bimbingan teknis
pajak daerah dan retribusi daerah,
penyiapan bahan perumusan

analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

Pinjam Dan Obligasi Daerah
Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

Fasilitasi Dana Perimbangan

Fasilitasi Dana Alokasi Umum
Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

Fasilitasi Dana Alokasi Khusus
Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber

Daya Alam Antara lain:
Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain:
Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain:
Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Akuntansi Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara